Kajian kebijakan

(program/penganggaran) penanggulangan kemiskinan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi

Disusun oleh:
Darmanto
Yeni Sucipto

ASPPUK

Jl. Pintu II Taman Mini Rt.015 Rw.03 No.37A Kel.Pinang Rianti Kec.Makasar, Jakarta Timur 13560
Tlp.+62-21-8406172 Fax.+62-21-87780329 Email: asppuk@indo.net.id, Website: asppuk.or.id

Kata Pengantar

Meski negara Indonesia dipandang masyarakat international sebagai bangsa yang memiliki pertumbuhan stabil, namun upaya peningkatan kesejahteraan kaum perempuan miskin tetap tidak maksimal. Informasi terbaru tentang kondisi kesehatan ibu melahirkan dan angka hidup balitanya seakan menjadi "lampu kuning" perhatian pemerintah terhadap kaum perempuan miskin. Angkanya tidak tanggung-tangung, yaitu diperkirakan kematian ibu berjumlah 9.500 saat melahirkan dan 157.000 bayi dan 200.000 anak balita meninggla dunia setiap tahunnya, sehingga diperkirakan lebih tinggi dari para negara tatangga. Bahkan di wilayah-wilayah sulit dan daerah tertinggal seperti Papua, AKI (angka kematian ibu) mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup. Ini angka yang luar bisa dimana telah mencapai angka psikologis nasional sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayinya mencapai 41 per 1.000 kelahiran hidup, dimana ini pun melampaui angka nasional yang sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. *(Kompas, Senin, 12 Nopember 2012).* Negara seperti menjadi "ladang pembantaian" bagi kelompok perempuan miskin khususnya.

Situasi tersebut sangat memprihatinkan di tengah-tengah ekonomi Indonesia yang terus meningkat. Namun realitas jumlah perempuan yang berada dalam kubang "kemiskinan" terus meroket. Ketimpangan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan laki-laki masih terus berlanjut. Dari data indek pembangunan gender (IPG 2010) menyebutkan angka melek huruf laki-laki 95,65 sementara perempuan 90,52. Demikian juga Index Pembangunan Gender (Gender-related Development Index/GDI) Indonesia 0,664 termasuk dalam peringkat yang rendah, yaitu peringkat ke-94 dari 177 negara dari Negara di Asean. Demikian juga sebuah laporan Global Gender Gap, 2011 dari aspek upah kerja laki-laki US $ 5.915 lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan $ 2.487.

Pada sektor usaha juga, perempuan-perempuan usaha mikro kecil senantiasa berjuang mempertahankan ruang-ruang pasar domestic yang semakin menciut. Fenomena liberasi ekonomi yang tampaknya menggerus eksistensi mereka. Di sektor domestic mereka harus bertarung dengan para tengkulak, pedagang-pedagang besar, pasar modern, sementara dari arus perdagangan luar negeri mereka harus berhadapan dengan laju produk asing.

Sementara itu fenomena makin maraknya perempuan-perempuan yang memilih bekerja keluar negeri sebagai tenaga migrant juga bisa dibaca sebagai semakin menipisnya pilihan alternative untuk terus bartahan di tempat tinggalnya. Hilangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, dsb. Data 2009 menyebutkan tidak kurang dari 4,3 juta orang menjadi buruh migrant, 78% nya merupakan perempuan yang bekerja di sektor domestik.

Terhadap gambaran situasi-situasi kemiskinan perempuan tersebut, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengatasinya. Salah satunya dalam RPJMN 2010-2014, Keputusan Presiden No 5 / 2010 menyebutkan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi khususnya pemerintah

mengeluarkan kebijakan dan program dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Karena sektor ini dianggap mempunyai peranan yang besar dalam perekonomian nasional. Di antaranya berbagai fasilitas permodalan bagi kelompok untuk UMKM digulirkan melalui fasilitasi permodalan, KUR, dana bergulir, Program Kemitraan BUMN (PKBL), dsb. Selain itu masih ada program nasional andalan pemerintah yaitu PNPM Mandiri. Namun sangat disayangkan program-program dinilai banyak kalangan masih jauh dari harapan capaiannya.

Atas dasar itulah, kajian tentang Kebijakan (Program/penganggaran) Penanggulangan Kemiskinan bagi Perempuan melalui Pengembangan UMKM dilakukan. Sedangkan yang menjadi tujuan kajian ini adalah: (1). Ingin memetakan masalah-masalah kemiskinan perempuan dan program pemerintah dalam mengatasinya, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi untuk perempuan (2). Ingin memetakan permasalahan sinergi kebijakan/program/penganggaran pusat daerah mengenai penanggulangan kemiskinan bagi perempuan.

Kajian ini dilakukan bekerja sama dengan jejaring ASPPUK di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Klaten, Kota Pontianak dan Kota Banda Aceh. Kajian ini juga melibatkan banyak kalangan, diantaranya legislative dan eksekutif daerah/nasional, CSO, akademisi, dan masyarakat local. Kajian ini dilakukan tidak sekedar menghasilkan blue print semacam karya ilmiah, namun lebih dari itu. Kajian ini mencoba mengajak kalangan yang terlibat untuk terus mengawal proses,ide-ide,pembelajaran yang baik untuk dilanjutkan dalam upaya mengubah situasi yang lebih baik, baik dari ranah kebijakan dan implementasi di lapangan.

Kajian ini masih terlalu dini untuk mengatakan sangat komprehemsif, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya dan lain sebagainya. Namun ada harapan dibalik penulisan kajian ini adalah adanya pengayaan kajian lebih lanjut, mengingat studi-studi seputar kemiskinan perempuan masihlah sangat terbatas.

Mia Ariyana
SEN ASPPUK

Daftar isi

Kata pengangantar ii
Daftar isi iv

Bab 1 Permasalahan
1.1 Batasan kajian 4
1.2 Tujuan kajian 5
1.3 Kajian teoritis 5
1.4 Metodologi 7
1.5 Alur kajian 7
1.6 Lokasi, periode dan partisipasi 8

Bab 2 Regulasi dan Program Pemerintah
2.1 Regulasi penanggulangan kemiskinan 8
2.2 Kebijakan dan program layanan permodalan (Nasional) 11
2.3 Kebijakan non permodalan 12

Bab 3 Program Penanggulangan Kemiskinan (Nasional)
3.1 Implementasi program pemberdayaan UMKM 14
3.1.1 Program KUR (kredit usaha rakyat) 14
3.1.2 Permodalan melalui fasilitas dana bergulir melalui BLU 15
3.1.3 Fasilitas pembiayaan usaha mikro melalui PKBL 16

Bab 4 Temuan nasional
4.1 Program permodalan usaha melalui KUR 17
4.2 Program permodalan melalui lemabga pengelolaan dana bergulir (LPDB) 20
4.3 Program kemitraan bina lingkungan (PKBL) 21
4.4 Program nasional PNPM Mandiri 21
4.4.1 Dana bergulir PNPM 23
4.4.2 Anggaran PNPM pedesaan 24

Bab 5 Potret kebijakan dan program di 3 (tiga) wilayah (kab.klaten, kab.banda aceh & kota pontianak)
5.1 Kasus kota banda aceh 25
5.1.1 Kebijakan penanggulangan kemiskinan banda aceh 27
5.1.2 Program penanggulangan kemiskinan dan implementasi di banda aceh 28
5.1.3 Permodalan usaha melalui PNPM 30
5.2 Kasus kota pontianak 30
5.2.1 Kebijakan penanggulangan kemiskinan kota pontianak 31
5.2.2 Program penanggulangan kemiskinan 31
5.2.3 Implementasi program PNPM Mandiri perkotaan 34

5.3 Kasus kabupaten klaten 34
5.3.1 Kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten klaten 35
5.3.2 Program penanggulangan kemiskinan dan implementasi di kabupaten klaten 36

Bab 6 Rangkuman temuan 3 (tiga) daerah (klaten, kota banda aceh dan kota pontianak)
6.1 Sintensis hasil kajian program pengembangan ekonomi di daerah 38
6.2 Isu-isu penting 41

Bab 7 Kesimpulan
7.1 Kesimpulan 43
7.2 Rekomendasi 44

Daftar pustaka 46
Daftar Tabel 49
Daftar Grafik 49
Daftar Singkatan 49

Bab 1. Permasalahan

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena sosial, ia ada pada semua belahan dunia, tidak peduli pada negara maju sekali pun. Maka itu topik kemiskinan akan terus menjadi topic sentral pembicaraan semua kalangan. Di Indonesia, masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar dalam proses pembangunan. Meski diakui perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih lambat dan jumlahnya relatif masih tinggi, lihat grafik 1.

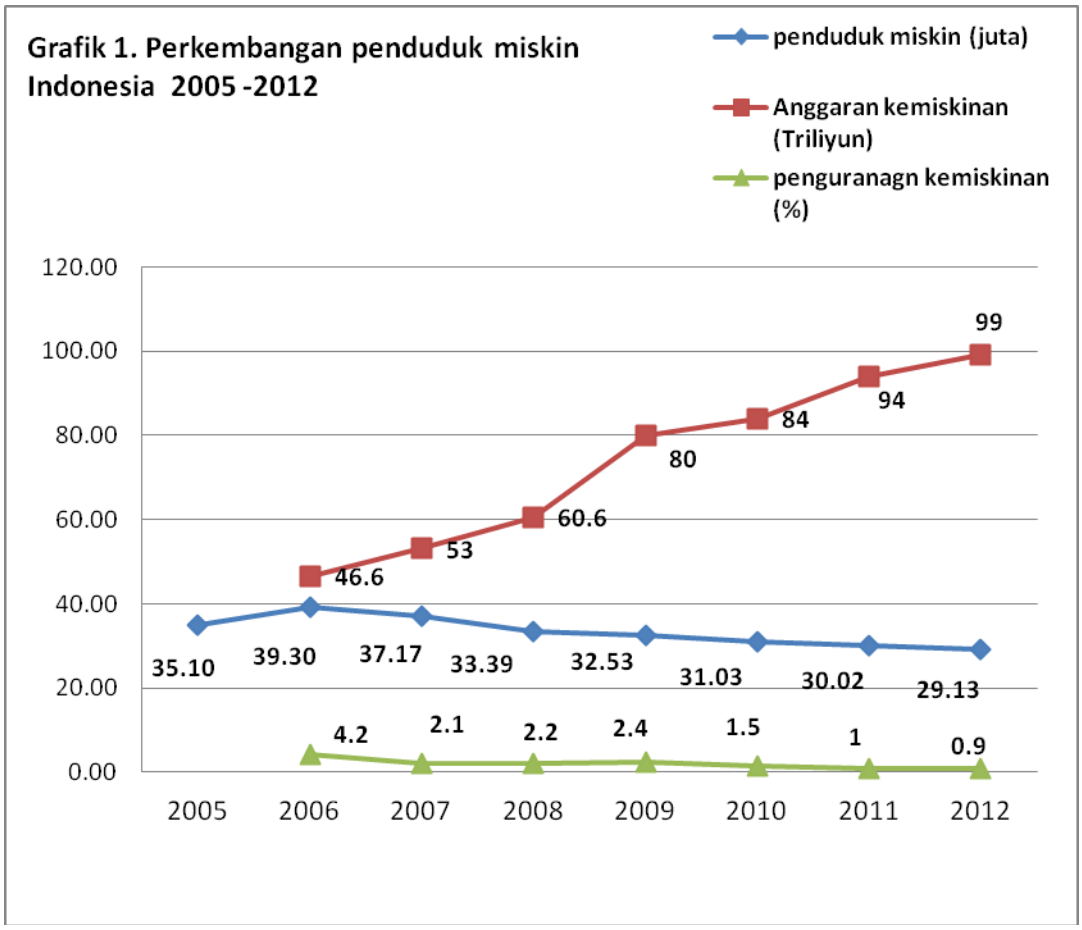

Sumber: BPS dan *APBN 2006 – 2012 (data olah)*

Dari data tersebut tingkat kemiskinan menunjukkan terus mengalami penurunan. Namun jika dikorelasikan dengan meningkatnya jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan untuk setiap tahunnya, prosentase penurunan angka kemiskinan sangatlah rendah, rata-rata pertahun hanya 2.04 %.

Fenomena pengangguran yang masih tinggi sekarang ini, juga semakin menegaskan mengapa penurunan angka kemiskinan bergerak lambat. Berdasarkan data sakernas 2012, jumlah angkatan kerja (AK) Indonesia saat ini sebesar 118 juta orang atau sekitar 67,86 % dari jumlah

penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja (PYB) sebesar 110,8 juta (93,90%), dimana sekitar 34,29 juta orang (30,90% adalah pekerja paruh waktu, dan jumlah pengangguran terbuka sebesar 7,2 juta orang (6,14 %). Meski jumlah penduduk yang bekerja (PYB) tinggi, sebenarnya masih banyak penduduk yang bekerja paruh waktu.

Kemudian, jika kemiskinan dikaitkan dengan isu gender, maka perempuan yang paling banyak terkena dampak. Data MDG's (2010) melaporkan, dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70%-nya adalah perempuan. Di Indonesia (BPS, 2009), dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan [1]. Dari data ini memanglah masih mungkin diperdebatkan, namun setidaknya deskripsi tentang profil kualitas hidup perempuan berikut ini, dapatlah menjelaskan potret kemiskinan perempuan tersebut, lihat **table 1**.

TABEL 1. SITUASI GAP KUALITAS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

• Jumlah wanita mencapai 118.669.196. Sekitar 6,5 persen atau sejumlah 7.760.110 diantaranya merupakan wanita rawan sosial (**BPS, Susenas, 2010**)
• Jumlah penduduk yang buta huruf di Indonesia 8,3 juta orang atau 5,1 persen dari populasi penduduk. Jumlah perempuan buta aksara sekitar 6,5 juta orang, sisanya laki-laki atau 3,5 juta orang. (Data Kementrian Pendidikan Nasional, 2010)
• Angka melek huruf laki-laki 95,65 perempuan 90,52 (**IPG 2009-2010**)
• Penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf dua kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. (**Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011 KPPPA & BPS**)
• Dari 100 penduduk perempuan 10 tahun ke atas, sebanyak 8 orang yang buta huruf. • Dari 100 penduduk laki-laki 10 tahun ke atas, sebanyak 4 orang yang buta huruf. • Dari 100 penduduk perempuan 15 tahun ke atas sebanyak 9 orang yang buta huruf. • Dari 100 penduduk laki-laki 15 tahun ke atas, ada sebanyak 5 orang yang buta huruf (**Statistik gender , BPS 2011)**
• Angkatan Kerja laki-laki 72.251.521 perempuan 45.118.964, bekerja laki-laki 67.989.943, perempuan 41.680.456 • Pengangguran Terbuka laki-laki 4.261.578, perempuan 3.438.508. Sekolah laki-laki 6.619.039, perempuan 6.485.255, Mengurus Rumah Tangga laki-laki 1.637.609, perempuan 31.252.814 (**BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker**)
• Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38, 26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), dan daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki. (**Buku Panduan Perencanaan dan Pengangaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Perindustrian, 2010**)

[1] Mukhaer Pakkanna, *Perempuan Kemiskinan dan Ekonomi Pancasila*, http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/06/perempuan-kemiskinan-dan-ekonomi-pancasila/, diakses tanggal 16 September 2012

• Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sebesar 51,76 persen, lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 83,65 persen. • Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (8,76 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki (7,51 persen). (**Statistik gender , BPS 2011**)
• Rata-rata upah pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki, baik di sektor pertanian maupun non pertanian (**Statistik gender , BPS 2011**)
• 53 persen perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja dibandingkan dengan 87 persen pria. • Pendapatan kerja laki-laki US $ 5.915, $ 2.487 untuk perempuan. Untuk menempatkan ini ke dalam perspektif, Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) perkapita (rata-rata perkiraan pendapatan yang diperoleh untuk laki-laki per orang) adalah $ 4.003, menunjukkan bahwa perempuan memperoleh jauh lebih kecil dari rata-rata nasional (**Laporan Global Gender Gap, 2011**)
• Menurut data SDKI menyatakan AKB telah menurun dari 35 per 1.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007) sementara AKI menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007). Yaitu harus mencapai target MDGs yaitu AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015. Dan saat ini Indonesia masih tergolong tinggi di antara Negara-negara ASEAN lainnya.
• Index Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index/* GDI) Indonesia 0,664 termasuk dalam peringkat yang rendah, yaitu peringkat ke-94 dari 177 negara dari Negara di Asean.

Situasi ketimpangan kualitas hidup perempuan dan laki-laki ini juga diperparah dengan anggaran yang ternyata tidak pro perempuan. Jika di lihat dari trend anggaran pemberdayaan perempuan periode APBN 2006 - 2012 besar anggarannya tidak lebih dari 0,015 % dari keseluruhan APBN [2]. Pada tahun2006, anggaran untuk pemberdayaan perempuan 0,014 %, pada tahun 2007 anggaran meningkat 0,15 % dan menjadi anggaran tertinggi untuk pemberdayaan perempuan selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Alokasi tersebut menurun cukup besar menjadi 0,010 % pada tahun 2008 dan menurun lagi menjadi 0,009 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 anggaran untuk pemberdayaan perempuan sedikit meningkat menjadi 0.11% dan sedikit menurun menjadi 0.010 % dan menunjukkan besar anggaran yang sama pada tahun 2012 sebesar 0.010 %.

Sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan beragam program. Secara jelas program-program tersebut termaktup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, di antaranya terbingkai dalam program nasional dalam 4 klaster, yaitu sebagai berikut: Klaster 1: program bantuan jaminan social, untuk mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

[2] Ayu Anastasia, dkk, *Penelitian kebijakan: Perempuan Anggota DPR RI dan Proses pembuatan Kebijakan Publik: Rancangan perubahan Undang-Undang tentang pemilihan Umum*, Women Research Institute, Juni 2012, hal, 2.

Klaster 2: pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan keterlibatan penduduk miskin dalam pembangunan. Klaster 3: program pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan usaha, serta membuka akses UMKM terhadap sumber-sumber dan pasar ekonomi yang luas. Klaster 4: program pro rakyat, melengkapi berbagai program dan kegiatan yang dijalankan melalui 3 klaster lainnya.

Terkait bidang pemberdayaan UMKM (yang menjadi fokus kajian ini) pemerintah telah mengintrodusir berbagai kebijakan dan program untuk pengembangan UMKM khususnya dalam bidang permodalan usaha. Berbagai fasilitas permodalan untuk UMKM yang digulirkan diantaranya mulai dari Kredit usaha pedesaan (Kupedes), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra) (program fasilitasi modal era 1997 – 1999). Kemudian pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membuat program-program fasilitasi permodalan UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Selain itu juga diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), yang di dalam programnya salah satunya permodalan usaha untuk perempuan (Kelompok simpan pinjam perempuan/SPP). Namun sayangnya, program dan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan belum berdampak besar pada pengurangan kemiskinan, khususnya perempuan.

1.1. Batasan kajian

Kajian ini pertama, akan memfokuskan diri pada bidang-bidang program pemerintah yang bersinggungan dengan isu-isu yang selama ini menjadi bidang garapan (concern) Asosiasi Pendamping Perempuan (ASPPUK).[3] Bidang-bidang itu di antaranya pada pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan program pemerintah khususnya pada klaster 3 pemberdayaan UMKM.

Pilihan focus kajian ini juga didasarkan, karena sektor ini dianggap mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini juga sebagian besar digeluti oleh perempuan, yaitu sekitar 60 % dari total UMKM.[4] Dan umumnya profil usaha mereka masih subsiten dan rentan, sehingga perlu daya dukung untuk keberlangsungan usaha mereka.

Kedua, kajian ini juga akan melihat keberadaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah yang lain, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi, yaitu program PNPM (klaster 2). Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa PNPM merupakan program nasional yang tentu akan bersinggungan dengan kelompok-kelompok perempuan yang menjadi dampingan ASPPUK. Selain itu, PNPM sendiri mempunyai sasaran program yang salah satunya

[3] Visi Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), yaitu: Terwujudnya Perempuan Usaha Kecil-mikro (PUK-Mikro) yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender. Sedangkan misinya terdiri dari 2 (dua): (1) Memfasilitasi terbangunnya gerakan PUK-Mikro yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mewujudkan sistem yang kondusif bagi proses demokratisasi, (2) Memfasilitasi terbangunnya akses dan kontrol PUK-mikro terhadap sumberdaya ekonomi.

[4] Kemenkop 2012

adalah perempuan, yaitu melalui kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dengan asumsi, bahwa SPP ini merupakan salah satu program pemerintah yang "affirmative " terhadap perempuan miskin. Sementara itu pemberdayaan UMKM dianggap sebagai program pemberdayaan ekonomi yang selama ini lebih netral gender. (lihat table 2).

TABEL 2. FOKUS KAJIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Pogram	Ruang lingkup kegiatan	Sasaran
Pemberdayan UMKM	• Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro • Bentuk kegiatan penyaluran dana KUR, dana bergulir, PKBL	Keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki usaha tetapi modal tidak memadai. (netral gender)
PNPM	• Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro • Bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan	Perempuan miskin (affirmative)

1.2. Tujuan kajian:

Kajian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memetakan masalah-masalah kemiskinan perempuan dan program pemerintah dalam mengatasinya, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi untuk perempuan.
2. Memetakan permasalahan sinergi kebijakan/program/penganggaran pusat daerah mengenai penanggulangan kemiskinan bagi perempuan.

1.3. Kajian teoritis

Kajian kemiskinan sebenarnya telah dilakukan banyak kalangan. Kemiskinan sendiri meskipun telah lama menjadi objek kajian, namun hingga kini 'situasi kemiskinan' itu senantiasa masih menghantui dalam kehidupan di masyarakat kita.

Membicarakan kemiskinan memanglah tidak mudah, karena kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang tidak mudah di nilai (assessed). Kemiskinan, yang kurang lebih dalam tinjauan tadisional melihat bahwa kemiskinan berarti mangacu pada rendahnya pendapatan. Sehingga melihat kemiskinan dapat diukur dengan cara sederhana, seperti mengukur kemiskinan hanya melalui batasan-batasan kemiskinan secara angka-angka (statistic).

Seperti dimensi kemiskinan yang digunakan world bank yang menentukan 2 US $ per hari sebagai standar minimum garis kemiskinan. Demikian juga dengan Asian Development Bank

(ADB) menggunakan 1.25 US $ per hari, dan pemerintah kita sekitar Rp. 7.060 perhari (BPS, 2011).

Pada kenyataannya mengukur kemiskinan tidak saja melulu terkait perolehan pendapatan, ketersedian pangan dan papan, namun juga melihat beberapa aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dsb (padangan modern). Beberapa teori kemiskinan yang tidak puas dengan ukuran-ukuran ekonomi saja, di antaranya, sbb:

- Friedman (1979)[5], kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi social dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

- Amartya Sen (1985)[6], bahwa memaknai sebuah kemiskinan lebih dari sekadar permasalahan ekonomi belaka. Kemiskinan juga merupakan akibat dari lemahnya kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat. Kemiskinan diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat di dalam menentukan kehidupan mereka.

Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kemiskinan di antaranya terkait masalah seberapa jauh seseorang/masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, pendidikan, politik dan social.

Pada masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya partiarkhi, peluang mendapatkan sejumlah akses sumberdaya, perempuan mendapat posisi sangat tidak menguntungkan, karena dalam budaya patriarkhi peran laki-laki sangat dominan. Sehingga sudah jamak, jika kalangan perempuan sering mengalami marginalisasi dalam setiap usaha mendapatkan akses sumberdaya tersebut. Perempuan akan menghadapi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang memiskinan perempuan. Di antaranya, marginalisasi ekonomi, yakni lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi (tanah, bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar). Perempuan juga menghadapi subordinasi , sehingga tidak punya peluang untuk mengambil keputusan. Saat perempuan mendapat peluang berbisnis umumnya mereka akan manghadapi beban ganda, tak jarang mereka juga mendapat stereotype dan kekerasan. Gabungan dari semua situasi ketidakadilan inilah yang membuat perempuan akan selalu terjerembab dalam situasi kemiskinan yang terus berlangsun (feminization of poverty).

---

[5] Dikutip Bagong Suyanto, *Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin*,(http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_%20Bagong.pdf, akses tanggal 10 Oktober 2012) di akses 5 Oktober 2012

[6] Dikutip Kemal A Stamboel, *Panggilan Keberpihakan, Strategi mengakhiri kemiskinan Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2012, hal 16

Ester Boserup[7] menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinan kaum perempuan yang meningkat peraturan kolonial diterapkan. Penerapan peraturan kolonial tersebut mengakibatkan perempuan tidak punya keterampilan, tanpa punya akses pendidikan, deskriminasi perempuan atas kepemilikan tanah/lahan, dan akses teknologi. Proses ekonomi dan politik kolonial untuk mengembangkan keterbelangan jelas menunjukkan cirri-ciri patriarkhi barat. Meski proses pencerabutan ekonomi dan politik ini memiskinkan laki-laki dan perempuan, kaum perempuanlah yang lebih menderita. Peluang perempuan untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi, penghasilan dan pekerjaan semakin buruk, beban pekrjaan semakin berat, kesehatan, gizi, pendidikan terus menurun.

Dalam era pembangunan keterpurukan perempuan masih terus berlangsung. Misalnya dalam penerapan revolusi hijau (masa orba), telah meminggirkan perempuan terhadap sejumlah aktivitas ekonomi di pertanian. Demikian pula pada era keterbukaan ekonomi (pasar bebas) seperti sekarang. Pemerintah melakukan ekspor bahan mentah secara besar-besaran demi untuk menghindari defisit neraca perdagangan. Akibatnya perempuan-perempuan pedagang mikro kecil yang umumnya bergerak pada jenis-jenis usaha dengan bahan baku potensi lokal menghadapi kelangkaan bahan baku. Proses ini terus berlanjut sehingga kelompok usaha mikro kecil yang umumnya subsisten, rentan akan mengalami kebangkrutan usaha dan semakin sulit melepas belenggu kemiskinan.

1.4. Metodologi:

1. Desk study :
    a) Data statistic (Susenas, Statistik Kesejahteraan, Statistik Ketenagakerjaan, Statistik Gender, Indek Pembangunan Manusia (IPM), Gender Development Indeks (GDI), dll),
    b) Dokumen APBN/D, Renja, Renstra, RPJMN/D, RKP, Data indikator, Regulasi Nasional, Perda, dll
2. Hasil Kajian ilmiah
3. Fokus Group Discussion (FGD)
4. Wawancara

1.5. Alur kajian:

1. Penyusunan tools
2. FGD / workshop tools
3. Pelaksanaan kajian di 3 daerah (Kab.Klaten, Banda Aceh, Kota Pontianak) dan Nasional
4. Analisis data
5. FGD temuan kajian
6. Finalisasi kajian
7. Diskusi publik/Seminar
8. Dokumentasi

[7] Dikutip Vandana Shiva, *Bebas dari pembangunan: Perempuan Ekologi dan perjuangan hidup di India*, Jakarta, Yayasan obor, 1998

1.6. Lokasi, periode dan partisipan

Kajian ini dilakukan di 3 (tiga) daerah, yaitu Kabupaten Klaten, Kota Pontianak dan Banda Aceh. Pilihan lokasi kajian atau penelitian pada umumnya berdasarkan

Pemilihan lokasi kajian lebih ditujukan karena alasan-alasan: Sebelum dilakukan kajian, di ketiga wilayah tersebut telah ada program ASPPUK sebelumnya, yaitu program SIAP II (Strengthtening Integrity And Accountability Program II) yang salah satu dampaknya adalah telah terbangun relasi-relasi yang cukup kuat, di antara stakeholder baik legislatif, maupun eksekutif. Dengan harapan keterlibatan legislatif dan mereka sejak awal dalam proses kajian ini akan mendorong diseminasi hasil kajian ke lingkungan institusi-institusi pengambil keputusan, sekaligus untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, program, dsb).

Sedangkan periode kajian ini dilakukan selama 6 bulan (Juli- Desember 2012). Sebagai pengayaan data-data lapangan melibatkan beberapa partisipan beberapa elemen masyarakat, di antaranya legislative dan eksekutif (Pusat dan Daerah), CSO, perempuan pelaku umkm, tokoh masyarakat, dll lihat tabel 3.

TABEL 3. UNSUR-UNSUR MASYARAKAT YANG TERLIBAT DALAM KAJIAN

Jumlah partisipan Kajian (Juli-Desember)

•Wilayah kajian	•partisipan	•Stakeholder & masyarakat elemen lain	
•Banda Aceh •Kota Pontianak •Klaten •Nasional (Jakarta)	375 Orang	•Disperidag,Koperasi,SKPD,DPRD,DPR RI,BPMPAKB,PNPM,BAPPEDA,Kementrian PPPA RI. •Tokoh mayasarakat,karangtaruna,PKK,LSM	35 Orang

Bab 2. Regulasi Dan Program Pemerintah

2.1. Regulasi penanggulangan kemiskinan

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan pemerintah sebenarnya telah memiliki beragam kebijakan dan program. Kebijakan dan program ini seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 pemerintah menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah "**Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan**". Untuk merealisasikan kebijakan ini pemerintah menetapkan yang salah satunya di bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mencakup

bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan,dan pangan. Program utama yang dilakukan di antaranya penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Untuk menegaskan aksi penanggulanan kemiskinan ini, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan lihat table 3, sebagai berikut:

TABEL 4. REGULASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Regulasi	**Substansi**
Peraturan Presiden RI No 15 Tahun 2010	Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. **Pasal 1**: bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. **Pasal 3**: menjelaskan tentang Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (a). mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (b). meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c). mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (d). mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. **Pasal 5** target kelompok sasaran, a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; d) Program-program lainnya yang baik secara langsung

	ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Inpres RI Nomor 1 Tahun 2010	**Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,** memberikan parameter 10 program prioritas pemerintah, yang kemudian dijabarkan oleh setiap kementrian dan lembaga hukum.
Inpres no 3 th 2010	tentang program pembangunan berkeadilan, maka pemerintah membuat program pro rakyat, program untuk semua (justice for all) dan program **pencapaian tujuan Millenium (MDGs.)** Dalam rangka pelaksanaan program pro rakyat, target pemerintah memfokuskan pada: 1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; 2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; 3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
Peraturan Presiden RI No.54/2005	Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. **Pasal 1:** (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas hukum sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. **Pasal 2:** Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010	Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
KepMen Koord Bid.Kesra No.25/kep/menko/Kesra/VII/2007	tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), sebagai peraturan teknis mengenai penanggulangan pengentasan kemiskinan

	Indonesia.
Instruksi Presiden No.9 / 2000	Menyatakan bahwa kebutuhan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan nasional termasuk perencanaan, konseptualisasi, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi.
Keputusan Presiden No 5 / 2010	Menyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan dalam proses pembangunan di berbagai bidang.

2.2. Kebijakan dan program layanan permodalan (Nasional)

Menyadari peranan kelompok usaha mikro kecil sebagai katup pengaman perekonomian nasional dan UMKM merupakan salah satu pilar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk keberlangsungan UMK, baik dari aspek pembiayaan maupun aspek non pembiayaan. Selain itu, menurut berbagai studi bahwa sektor UMKM ini ternyata banyak dimasuki oleh tenaga kerja perempuan, yang pendapatan usaha banyak mengontribusi ekonomi keluarga, maka sektor ini diyakini akan mendorong dalam pengurangan angka kemiskinan.

Sebagai payung hukum untuk permodalan ini permerintah menerbitkan beberapa kebijakan di antaranya UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, sebagai revisi UU no 9, 1995 yang hanya mengakui keberadaan usaha kecil. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dimana UU ini secara khusus memiliki cakupan pada aspek permodalan. UU Koperasi saat ini juga telah diperbarui, yaitu UU No. 17 tahun 2012, meski saat ini sedang banyak menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat.

TABEL 5. KEBIJAKAN PERMODALAN TINGKAT PUSAT

Kebijakan	**Substansi**	**Cakupan**
UU No.25 Tahun 1992	Penguatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi	Permodalan dan non permodalan
UU No. 17 tahun 2012	Perkoperasian	Permodalan dan non permodalan
UU No. 20 Tahun 2008	• Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan usaha mikro kecil sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional • Pemerintah mendorong iklim usaha yang kondusif, meliputi aspek: pembiayaan, sarana prasarana, kemitraan, perijinan usaha, dll	Permodalan dan non modal
Inpres No 3 Tahun 2006	Mendorong kelembagaan pelayanan investasi, reformasi sektor keuangan. Juga secara khusus mendorong	Permodalan dan non permodalan

	pemberdayaan UMKM dalam peningkatan akses permodalan, kewirausahaan & peluang pasar	
Inpres No. 6 Tahun 2007	Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM	Aspek permodalan dan non modal
Permen Keuangan No 99/PMK 05/2008	Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/lembaga Menteri Keuangan.	Aspek permodalan
Permendagri No 61 tahun 2007	Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	Aspek permodalan
Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007	Fasilitas pembiayaan usaha mikro melalui PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).	Aspek permodalan dan non modal
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra No 25/kep/menko/Kesra/VII/2007	Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)	Aspek permodalan dan non modal

2.3. Kebijakan non permodalan

Pelaksanaan pemberdayaan UMKM selain pada aspek permodalan juga dilakukan pada aspek non permodalan. Beberapa kebijakan terkait non permodalan di anataranya sebagai berikut:

TABEL 6. KEBIJAKAN NON PERMODALAN

Regulasi	**Substansi**
Inpres No. 6 Tahun 2007	Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Tujuan kebijakan ini adalah: a. Menjaga kempentingan umum dan meningkatkan efisiensiekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan Rakyat. b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Permen Keuangan No 99/PMK 05/2008	Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
Permendagri No 61 tahun 2007	Tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Permen BUMN No. Per-	Tentang Sektor Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan

05/MBU/2007	Beberapa Syarat untuk Investasi Asing

Bab 3. Program Penanggulangan Kemiskinan (Nasional)

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah menggunakan Strategi Nasional Penanggulangan kemiskinan (SNPK) sebagai landasan. SNPK ini pada masa pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono kemudian dituangkan dalam RPJMN (periode 2004 -2009 dan periode 2009 – 2014) yang terkenal dengan program pro rakyat. Sedangkan program pro rakyat ini diwujudkan dalam kategori 4 klaster. (lihat tabel 6)

Tabel 7 . KLASIFIKASI PROGRAM 4 KLASTER

Klaster	Program	Penanggung jawab program
I	Bantuan sosial: 1. Program Keluarga Harapan (PKH), 2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), 3. Program Beras untuk rakyat miskin, 4. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 5. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) 6. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)	• Kemensos • Kemenkes • Kemensos • Kemensos • Kemendiknas • kemensos
II	Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 2. Program Pembangunan Kecamatan (PPK), 3. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), 4. Program Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT).	• Kemendagri • Kemendagri • Kemendagri • kemendagri
III	Pemberdayaan UMKM. 1. KUBE (Kelompok Usaha Bersama), 2. PPEMP (Program Pemberd Ekonomi Masyarakat Pesisir) 3. P4NK (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Kecil) 4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	• Kemensos • Kementrian kelautan&perikanan • Kementrian pertanian
IV	Program pro rakyat 1. Program Rumah sangat murah 2. Program kendaraan angkutan umum murah 3. Program air bersih untuk rakyat 4. Program listrik murah & hemat 5. Program peningkatan kehidupan nelayan 6. Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan	• Kementrian perumahan rakyat • Kementrian PU • Kementrian PU • Kementrian PU • Menteri Kelautan dan Perikanan • Kementrian PU

3.1. Implementasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Berdasarkan RPJPN 2005- 2025 pemberdayaan koperasi dan UMKM dipilah menjadi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pemberdayaan usaha mikro, dan penguatan kelembagaan koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan untuk merealisasi empat agenda prioritas di sepanjang tahun 2012 ini. Empat agenda prioritas yang akan diusung Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2012 adalah menyiapkan koperasi untuk go internasional, memberikan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kualitas. [8]

Sedangkan program secara khusus terkait permodalan usaha di antaranya melalui:

3.1.1. Program KUR (kredit usaha rakyat) (Klaster 3).

Skema Kur [9]

Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pad a tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKM dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

KUR telah diluncurkan 2007 sebagai tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank

[8] *Kemenkop miliki 4 agenda prioritas*, "http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=792:kemenkop-miliki-4-agenda-prioritas&catid=50:bind-berita&Itemid=97" diakses tanggal 8 November 2012

BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Secara umum Skema KUR yang telah disepakati Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin dan Permerintah sebagai berikut:

1. Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur
2. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
3. Pembagian resiko penjaminan: Perusahaan Penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
4. Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
5. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Menurut Hatta Rajasa, selain 6 bank yang telah menyalurkan KUR, kini bank-bank penyalur ditingkatkan dengan melibatkan Bank Pembangunan Daerah. Total bank penyalur KUR tahun 2012 bertambah menjadi 33 bank, dan juga menambah lembaga penjamin Askrida (Asuransi Kredit Daerah) [10].

3.1.2. Permodalan melalui fasilitas dana bergulir melalui BLU (Badan Layanan Umum) sebagai pengelola dilakukan lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) (Per Men Kop Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : 25/Per/M.Kukm/V/2007).

Dalam Permendari No 61/2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 Ayat 1).

Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Untuk wilayah provinsi Unit layanan Umum ini sering di sebut sebagai UPDB (Unit Pelayanan Dana Bergulir). Sedangkan sumber dana dari program ini berasal dari APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan pengguliran dana bergulir untuk UMKM pada tingkat nasional

[9] Disarikan dari , *Skema penyaluran kredit usaha rakyat*, "http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=351," diakses 8 November 2012

[10] *Target penyaluran KUR 2012 sebesar Rp 30 triliun*, http://nasional.kontan.co.id/news/target-penyaluran-kur-2012-sebesar-rp-30-triliun, diakses, 9 November 2012

dilaksanakan BLU – LPDB di bawah kementrian Koperasi dan UMKM sedangkan di daerah dilakukan BLUD.

3.1.3. Fasilitas pembiayaan usaha mikro melalui PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).

PKBL dilaksanakan dengan dasar **UU No.19 tahun 2003** ttg BUMN serta **Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007** yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Demikian juga PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Selain dari ketiga program permodalan tersebut, beberapa program pemberdayaan ekonomi lain yang terkait, yaitu PNPM dan program-program lain dari beberapa kementrian terkait (lihat table 7).

TABEL 8. PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM

No	Program pemberdayaan UMKM	Sasaran	Penanggung jawab
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Kelompok-kelompok usaha mikro kecil	• Kemendagri untuk pedesaan • Kementrian PU untuk perkotaan
2	Program pemberdayaan ekonomi dari berbagai kementrian terkait pemberdayaan UMKM. • KUBE (Kelompok Usaha Bersama), • PPEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) • P4NK (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Dan Nelayan Kecil) • dll	UMKM (produsen pertanian, kecil produsen kehutanan, kecil kelautan dan perikanan produsen) dan Koperasi	• Kementerian Koperasi dan UKM • Departemen Perdagangan • Departemen Perindustrian • Departemen Pertanian • Departemen Kehutanan • Departemen Kelautan dan perikanan • Kementrian Daerah Tertinggal • Kementrian Pendidikan • dll

Bab 4: Temuan Nasional

4.1. Program permodalan usaha melalui KUR

Peranan UMKM dan Koperasi dalam mengurangi angka kemiskinan tidak diragukan lagi (pengalaman masa krisis 1998). UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, khususnya di sektor informal. Namun usaha mikro kecil meski jumlahnya sangat besar kontribusinya terhadap PDB tergolong kecil, jika dibandingkan dengan Usaha besar yang unit usahanya sangat sedikit tetapi menyumbang PDB yang besar.

Untuk itu untuk meningkatkan kualitas dan mendukung kelangsungan Koperasi dan UMKM, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) telah menggulirkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat salah satunya melalui pembiayaan. Program yang selama ini berjalan terkait pembiayaan ini salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan tidak kurang 6 tahun sejak 2007.

Usaha untuk mendorong tumbuh kembang sektor UMKM dan koperasi merupakan hal yang sangat strategis. Mengingat jumlah mereka relative besar (lihat Grafik 2).

GRAFIK 2. PROFIL UMKM 2010

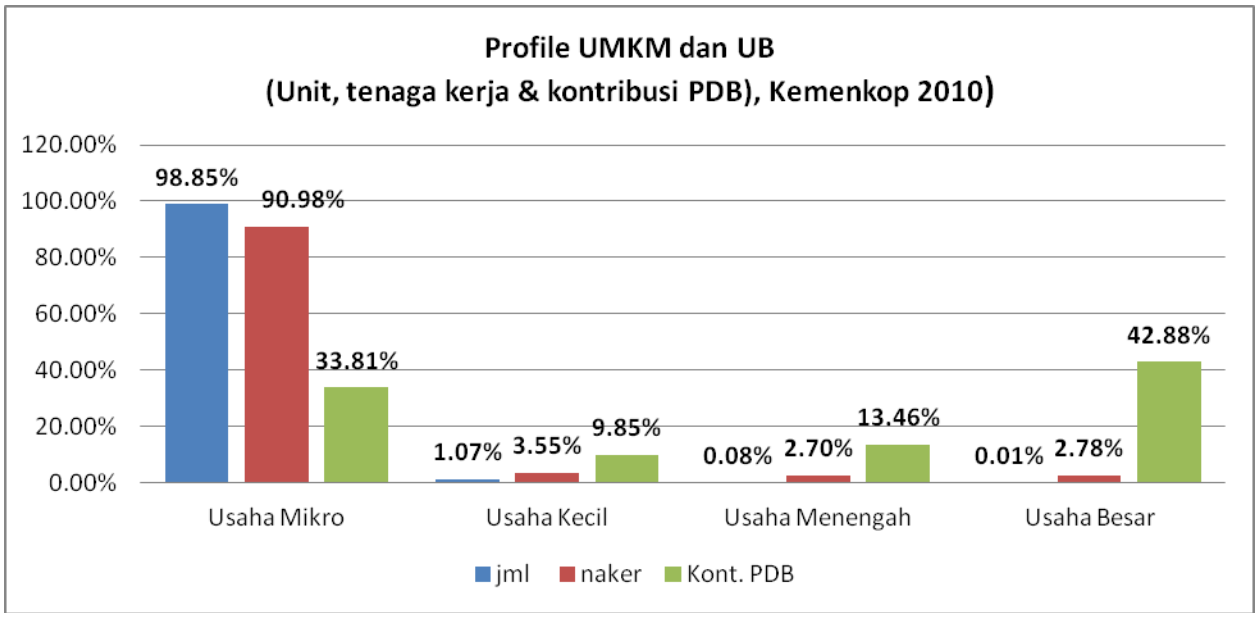

Ket: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 53.823.732, terdiri dari Usaha Mikro 53.207.500, Usaha Kecil (UK) 573.601, usaha menengah 42.631. Sedangkan usaha besar 4.838. (Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) , Kemenkop dan UMKM, 2010

Sementara jumlah koperasi saat ini mencapai 188.181 unit Koperasi di Indonesia, lihat detil grafik 7 [11].

GRAFIK 3. PERTUMBUHAN KOPERASI DAN KEANGGOTAAN

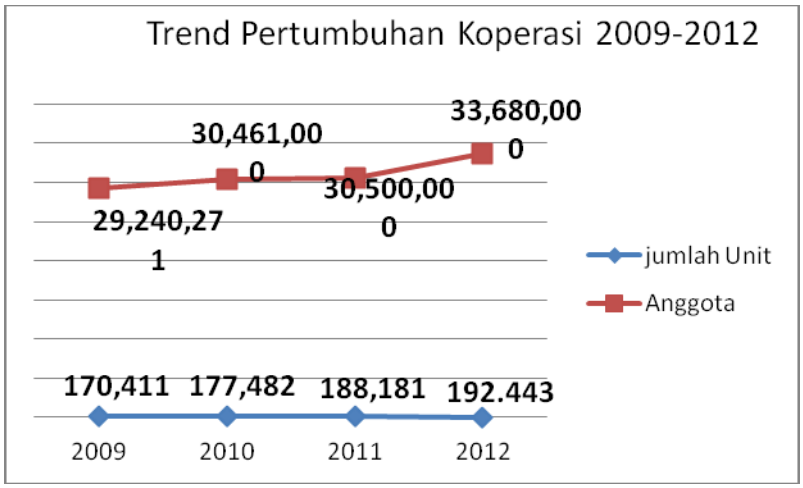

Dari pemaparan kedua data di atas jelas jumlah UMKM dan koperasi sangat fantastis. Tetapi ternyata umumnya mereka belum mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Dari survai database survai ASPPUK 2008, [12] menunjukkan bahwa perempuan usaha kecil (PUK) 80.52 % tidak pernah meminjam pada bank, 10.10 % pernah pinjam kepada Bank (formal). Sedangkan alasan mereka enggan untuk memijam pada bank formal di antaranya, proses mengurus pinjaman di bank rumit 30.80%, tidak memiliki asset untuk agunan 11.65 %, tidak pernah berhubungan dengan bank 21.19%.

Menurut biro riset infobank, ada hampir 38 Juta pelaku usaha mikro di lapisan terbawah (productive poor) hampir semuanya belum tersentuh layanan keuangan formal, karena meraka dianggap belum bankable dan berisiko kredit macet tinggi (lihat table 8).

TABEL 9. KREDIT TERHADAP PELAKU USAHA[13]

Skala usaha	Jumlah	Plafon Pembiayaan	Yang terlayani
Kecil menengah besar	615,60 ribu	Rp50 Juta ke atas	99%
Mikro	16 Juta	Rp3-50 juta	40%
Productive poor	37,38 juta	<Rp3 juta	<10%

Sumber: Biro Riset Infobank

[11] Diolah dari sumber http://www.depkop.go.id/ akses 3 Orktober 2012

[12] Database survey perempuan usaha kecil, *Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecl/ASPPUK* 2008(tidak diterbitkan)

[13] Karnoto Muhammad, *Ada Zona Biru, Siapa Berani masuk ?*, Infobank,*No.403 Oktober 2012*, hal.33

Dari data-data tersebut tampaknya relevan, jika dikaitkan dengan fenomena serapan dana KUR sejak 2007 hingga 2012 masih sangat rendah (grafik 8) [14].

GRAFIK 4. REALISASI AKUMULASI KUR 2007-2012

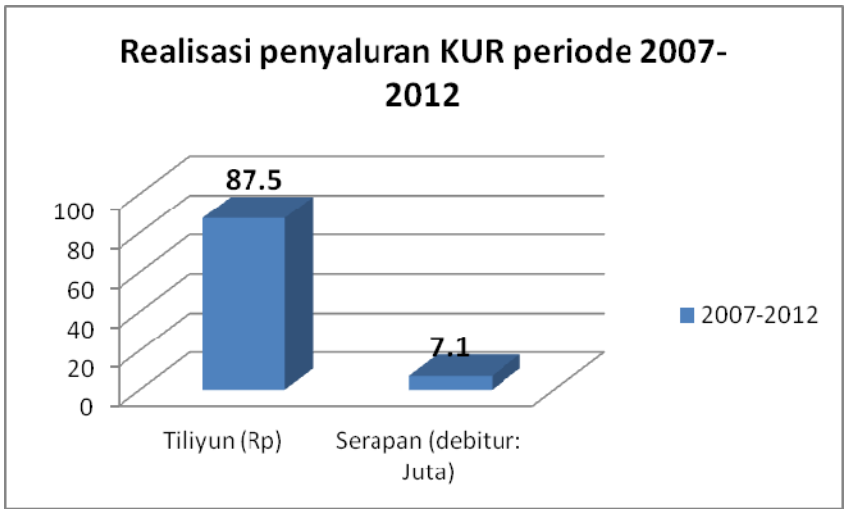

Dari gambaran grafik 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika data serapan KUR saat ini 7,1 Juta dikorelasikan dengan jumlah usaha mikro 53.207.500, berarti pembiayaan KUR baru berdampak pada sekitar 13 % atau sekitar 947.423 pelaku Usaha mikro. Jika asumsinya semua pengakses KUR berasal dari sektor pelaku usaha mikro.

- Jika dari pelaku usaha mikro yang berjumlah 53.207.500 itu asumsi 60 % nya[15] adalah perempuan pengusaha (atau 31.924.500), berarti dari angka serapan KUR sebesar 7.1 juta tersebut, baru berdampak pada pelaku usaha mikro perempuan 22 % (1.579.038). Jika asumsinya semua pengakses KUR berasal dari sektor pelaku usaha mikro.

- Jika saat ini jumlah penduduk miskin 29.13 Juta, berarti dengan mengembangkan sektor usaha mikro kecil yang saat ini jumlahnya 53,781,101, berarti sudah mampu menanggulangi kemiskinan melalui sektor ini, dengan catatan ada upaya yang serius dari pemerintah. Tentu saja tidak semua sektor usaha mikro ini bisa dijustifikasi sebagai kelompok miskin. Tetapi setidaknya dengan memberdayaakan mereka pemerintah telah menanggulangi mereka dari situasi rentan sosial (jatuh miskin). Karena secara umum profil usaha mikro adalah masih subsisten.

[14] Di olah dari artikel, *Penyaluran KUR Capai Rp 24 Triliun*, http://www.setkab.go.id/berita-6400-hingga-september-2012-penyaluran-kur-capai-rp-24-triliun.html, (di akses tanggal 9 November 2012)

[15] Data Kemenkop dan UMKM, 2010 , *Daya Tahan Perempuan dalam Mengelola UKM*, http://www.infobanknews.com/2012/06/daya-tahan-perempuan-dalam-mengelola-ukm/ akses 10 Oktober 2012

4.2. Program permodalan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB)

Salah satu tugas pokok LPDB (pusat dan daerah) adalah melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Peningkatan Permodalan dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Perekonomian Daerah.

Grafik 5 menunjukkan realisasi dana bergulir selama kurun waktu 2008 -2012 di seluruh Indonesia sekitar 3,94 T dengan mitra 1516, jadi perkiraan untuk masing-masing mitra mendapatkan 2,6 Milyar.

GRAFIK 5. REALISASI DANA BERGULIR LPDB 2008-2012

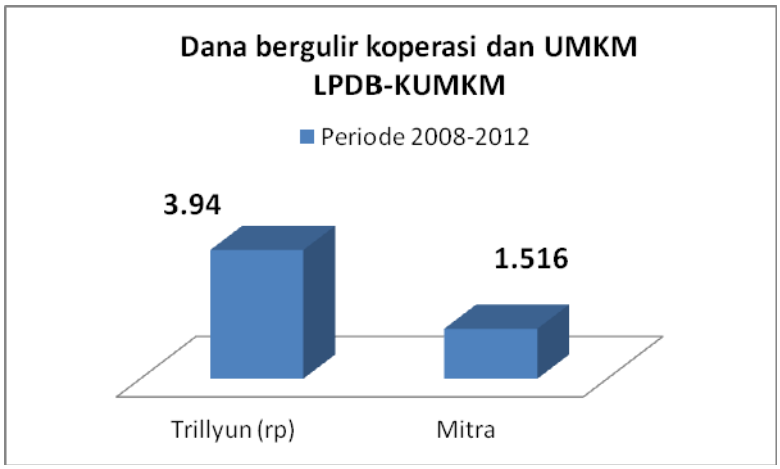

Namun meski, LPDB ini sasarannya untuk usaha mikro kecil dan koperasi ternyata dalam implementasinya masih cukup rumit. Misalnya LPDB masih memberlakukan seleksi cukup ketat terhadap koperasi sebagai calon nasabah, demikian juga untuk pelaku Usaha mikro [16]. Di samping itu dana bergulir LPDB ini untuk wilayah Jawa masih mendominasi, lihat table 9. [17]

TABEL 10. REALISASI DANA BERGULIR

Provinsi dengan realisasi penyerapan					
Dana bergulir tertinggi			Dana bergulir terendah		
Provinsi	(rp)	Mitra	Provinsi	(rp)	Mitra
Jawa Tengah	382.545.353.925	281	Papua	1.700.000.000	4
DKI Jakarta	279.434.532.986	58	Kep. Riau	1.716.700.000	3

[16] LPDB biasanya memberlakukan seleksi berupa pengkategorian koperasi sangat baik – buruk untuk menekan resiko kredit macet atau NPL (non performen loan).

[17] *LPDB tawarkan Pembiayaan Murah*, Majalah Bisnis UMKM, Ed.No. 44/IV/Oktober 2012,hal.6

Jawa Timur	287.622.873.500	176	Gorontalo	1.725.000.000	7
Sulawesi Selatan	254.452.014.200	76	Kep. Bangka Belitung	2.000.000.000	2
Jawa Barat	244.445.195.660	186	Sulawesi Utara	3.850.000.000	7

4.3. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Masyarakat, khususnya pelaku umkm dan koperasi selain mendapatkan dukungan program-program KUR, dana bergulir, pemerintah juga masih menyediakan program fasilitasi permodalan Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

TABEL 11
LAPORAN DANA TERSEDIA PROGRAM KEMITRAAN
2007 - 2011 (dalam Rp)[18]

Uraian	th2007	th2008	th2009	th2010	th2011
Penyaluran	2,505,000,000	3,529,000,000	4,074,430,000	5,102,200,000	4,605,500,000
Dana Pembinaan (hibah)	83,956,000	127,642,000	242,139,080	539,220,700	680,687,118
Beban Operasional	134,159,023	133,157,010	284,680,150	229,195,797	-

Dari data yang tersaji menunjukkan dana PKBL mengalami trend meningkat (dana hibah). Hanya saja dana PKBL ini belum banyak tersosialisasi di masyarakat. Di samping itu dana PKBL biasanya masih berupa dana-dana "charity", dan juga bernuansa pembentukan citra saja (image building).

4.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Secara umum PNPM Mandiri dikelompokan menjadi 5 jenis (lihat tabel 10)[19]

[18] Sumber: http://www.bumn.go.id/ptpn8/tanggung-jawab-sosial/program-kemitraan/ (data di olah) akses 15 Oktober 2012

[19] Dikutip dan disarikan dari Sri Lestari Rahayu," Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang dan Ke Depan, Bandung, Fokus Media, 2012, hal 82 - 104

TABEL 12. PENGELOMPOKKAN PNPM

Kelompok program	Tujuan	Jenis kegiatan
PNPM Perdesaan	Peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja, mendorong kemadirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan	Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana bagi rumah tangga miskin,pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan kelompok perempuan dan penambahan permodalan simpan pinjam perempuan
PNPM Perkotaan	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman yang berkualitas di perkotaan.	Selain kegiatan infrastruktur , juga memberikan bantuan sekolah, pelatihan ketrampilan, peningkatan kesehatan, santunan, dan dana bergulir
PPIP*	Peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan,menyusun perencanaan dan pembangunan infrastruktur di desa
P2DTK**	Mempersiapkan sarana dan prasaran infrastruktur di perdesaan	Peningkatan jalan,pembangunan drainase, irigasi,renovasi gedung sekolah,kesehatan,pelayanan dasar, dll
PISEW**	Mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya local untuk mengurangi kemiskinan,pengembangan ekonomi local, kesenjangan wilayah, penguatan institusi local desa, dsb	• Penyediaan infrastruktur berskala kecil (transportasi,produksi pertanian,pemasaran,air bersih,dsb) • Pelatihan dan pendampingan

*PPIP yaitu PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
**P2DTK yaitu PNPM Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus
*** PISEW yaitu PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

4.4.1. Dana Bergulir PNPM

Dana bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah dana BLM yang telah digulirkan kepada masyarakat dalam bentuk simpan pinjam yang terdiri dari simpan pinjam perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk mendapatkan pinjaman perguliran ini baik SPP maupun UEP maka masyarakat harus mengadakan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa yaitu terdiri dari Musyawarah Desa Sosialisasi, Musyawarah desa Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus Perempuan, Musyawarah Desa Perencanaan. Setelah melakukan Musyawarah Desa maka Tim dari PNPM-MP di kecamatan masing –masing membentuk Tim Verifikasi, dimana Tim ini akan berguna untuk memverifikasikan Usulan proposal yang diajukan di kecamatan, dimana tim verifikasi ini menyimpulkkan layak atau tidak layaknya kelompok perempuan ini mendapatkan pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan Tim Pengelola kegiatan dan Tim Verifikasi melakukan suatau pembahasan akhir dan membuat Rekomendasi terhadap kelompok-kelompok pengajuan proposal peminjaman dan setelah itu akan mengadakan Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD II).

MAD Prioritas usulan merupakan MAD perengkingan dimana Pengurus kelompok hadir dalam MAD ini untuk meloby kan angka kepada kelompok lain agar kelompoknya mendapatkan Perangkingan yang tertinggi dan jika mendapatkan rengking yang tertinggi maka kelompok tersebut secara sah untuk didanai lebih cepat. Kemudian Tim Kecamatan melakukan MAD Penetapan Usulan dimana dalam musyawarah ini menetapkan usaulan mana yang mendapatkan rengking tertinggi maka kelompok ini mendapatkan penyaluran dana yang pertama/duluan sesuai dengan dana yang telah terdapat di buku Kas maupun Buku Bank SPP dan UEP yang ada di UPK. Kelompok-kelompok yang dibelakang diharapkan menunggu sampai giliran yang telah ditetapakan di MAD Penetapan Usulan.

BAGAN 1. MEKANISME DANA BERGULIR

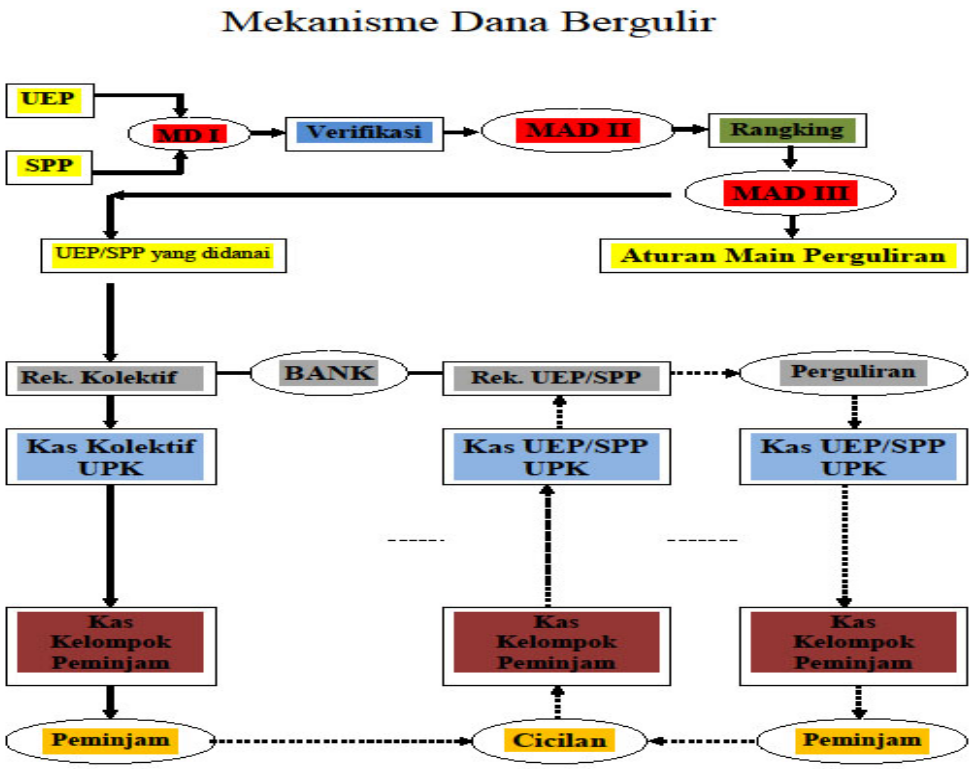

4.4.2. Anggaran PNPM Perdesaan

Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada 2008, PNPM Mandiri Perdesaan dinikmati di 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program-program lain yang melekat pada PNPM Mandiri Perdesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-Respek), PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP), dan lain-lain.

Pada 2010, berdasarkan ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75,9% dari total lokasi PNPM Mandiri. Dan jumlah anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sudah disalurkan sampai tahun 2011 sebesar Rp 10,3 triliun.

GRAFIK 6. ALOKASI DANA PNPM MANDIRI 2010-2012

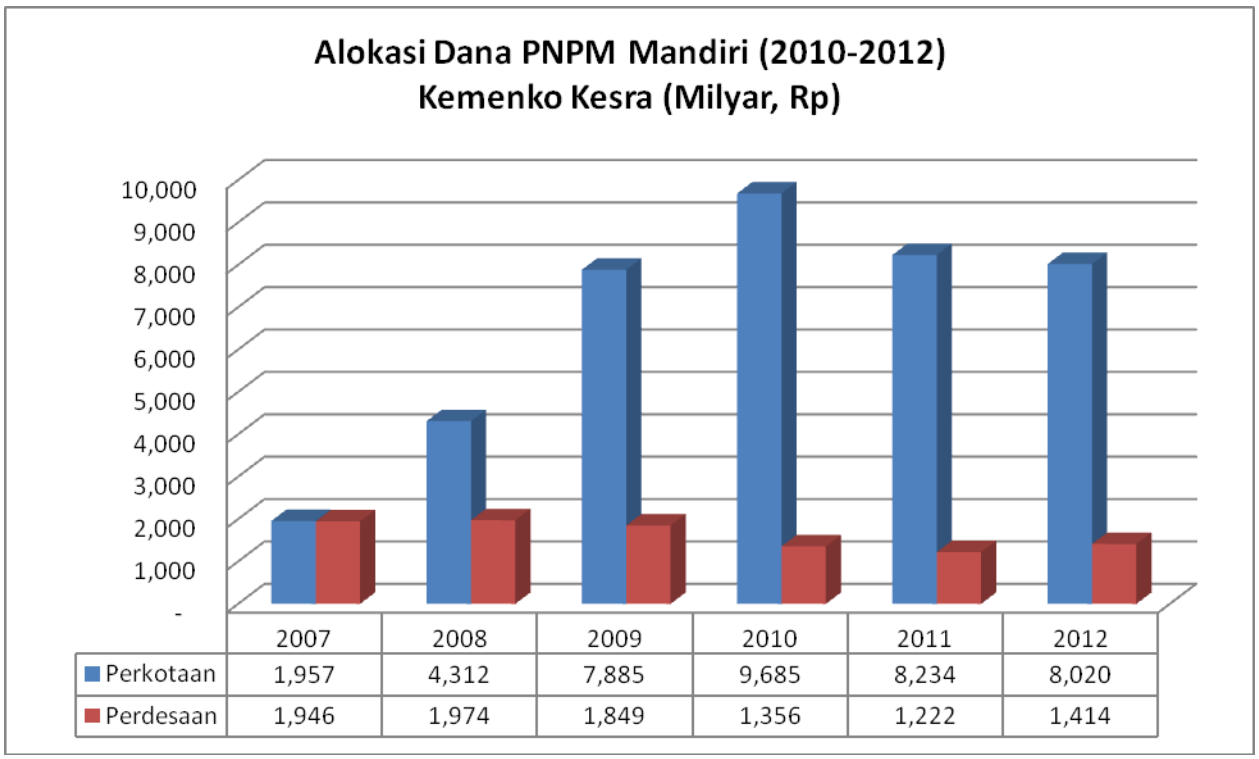

Terkait dengan dana untuk kelompok perempuan, Simpan pinjam perempuan (SPP) adalah dana program PNPM-MP yang didapatkan dari anggaran BLM tahunan yang disisihkan sebanyak 25% dari jumlah keseluruhan. Sedangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah dana program PNPM-MP yang digunakan untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tahun 2010, Simpan Pinjam Perempuan teralokasi sebesar Rp. 4.3 T dengan penerima manfaat 3.3 Juta (60% dari UMKM) di asumsikan setiap perempuan penerima SPP mendapatkan alokasi sebesar Rp.133.250 / tahun.

Bab 5. Potret Kebijakan dan program di 3 (tiga) wilayah (Kabupaten Klaten, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak)

5.1 Kasus Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 wilayah kecamatan, ada 5 penambahan wilayah kecamatan baru yaitu Jaya Baru, Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda raya dan Kuta Raja. Total jumlah penduduk Aceh berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2010 berjumlah 223.446 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 108.348 dan laki-laki 115.098.

GRAFIK 7. TINGKAT KEMISKINAN BANDA ACEH

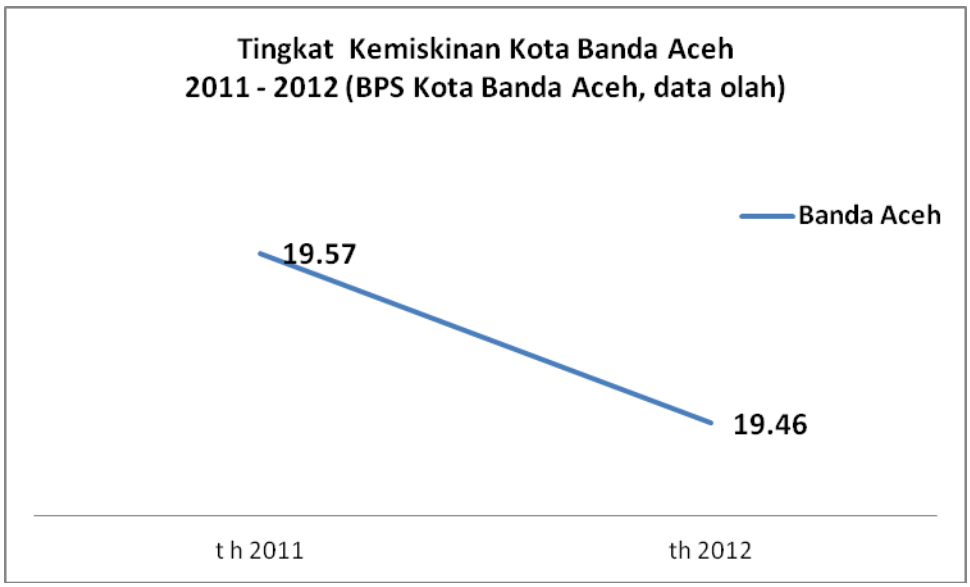

Data di atas menunjukkan adanya penurunan kemiskinan Aceh. Namun angka penurunan kemiskinan tidak signifikan yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 3,495 pada Maret 2011 menjadi 3,548 pada Maret 2012. Selain itu, jelasnya indeks keparahan kemiskinan (IKK) menurun membaik yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,483 dan Indeks Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,940 meningkat menjadi 0,994 pada periode yang sama (Publikasi Resmi BPS Banda Aceh, 2012)

GRAFIK 8. TINGKAT PENGANGGURAN BANDA ACEH

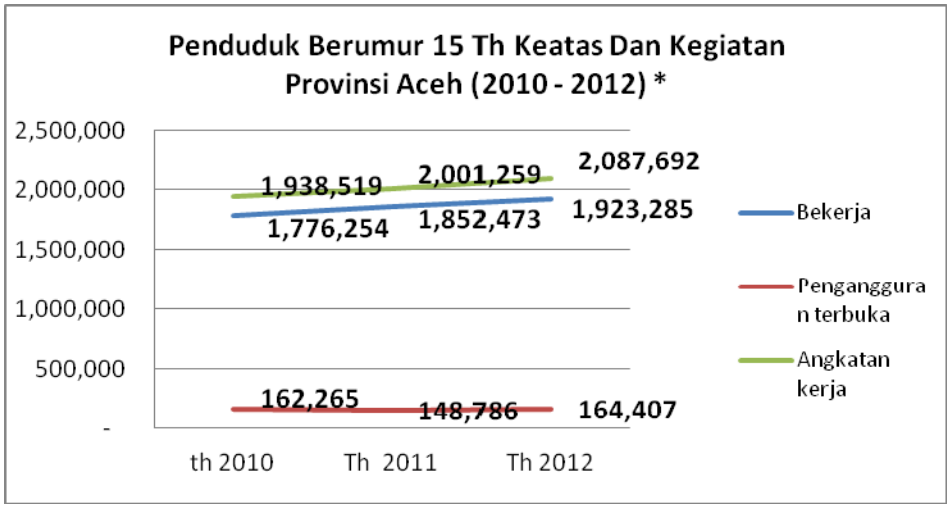

* Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Labor Force Situation In Indonesia Bps – Statistics Indonesia, 2012 (data olah)

Jika melihat data di atas dapat disebutkan prosentase pengangguran terbuka dari Total angkatan kerja th 2010 sekitar 8 %, Kemudian Tahun 2011 sekitar 7 %, Tahun 2012 meningkat kembali menjadi 8%. Ini berarti laju penurunan tingkat pengangguran hanya bergerak kisaran 1 % (kecil cenderung stagnan). Sementara itu pertumbuhan angkatan kerja lebih bergerak progresive, yaitu kisaran 4 % pertahunnya. Hal ini tidak sejalan dengan peningkatan jumlah anggaran untuk penanggulan yang setiap tahunnya meningkat.

Berdasarkan data terakhir Desember 2011, jumlah AKI melahirkan di Aceh berkisar 190/100.000 kelahiran hidup (KH) dan AKB berkisar 30/1.000 KH. http://epi4-indonesia.org/id/?p=652

5.1.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Banda Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi yang dimiliki kewenangan penuh untuk melakukan desentralisasi. Asumsinya Aceh akan memiliki seperangkat regulasi dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa regulasi yang terkait dalam program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi di antara Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2008, yaitu tentang petunjuk teknis bantuan perluasan permodalan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil. Kemudian pada tingkat kota Banda Aceh, Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 144 Tahun 2012 yang memuat substansi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Banda Aceh.

Regulasi yang lain, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, di antaranya kebijakan daerah Kota Banda Aceh Qanun Aceh No.6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan, Qanun Aceh Tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan Bab V, Pasal 9, (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Namun tampaknya regulasi-regulasi yang ada ternyata masih belum memadai khususnya dalam mendorong program percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini seperti yang mucul dalam FGD Banda Aceh.

Kasus di Banda Aceh yang ditemukan terkait dengan isu-isu harmonisasi program dan implementasi program di antaranya: 1). Dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan SKPD memiliki data sendiri, dimana pendataannya menggunakan indikator yang ditetapkan secara nasional. Padahal, kriteria masyarakat miskin setiap daerah tidak sama.
2). Pada pelaksanaan program masih sering terjadi ego sektoral di antara dinas-dinas. Sehingga situasi ini sering mengabaikan koordinasi di antara dinas yang ada. Misalnya: Badan pemberdayaan perempuan bukan badan pelaksana kerja, perannya adalah koordinator yang melakukan peran koordinasi untuk semua pihak terkait / SKPA yang punya program. Misal kita punya SKPK sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perikanan, dinas perkebunan dan kehutanan, diantara dinas yang ada termasuk disana BP3A banda aceh, seharunya BP3A melakukan koordinasi untuk merubah cara berpikir semua SKPA, agar melahirkan program-program keberpihakan terhadap perempuan. (**Hasil FGD Banda Aceh**)

5.1.2. Program penanggulangan kemiskinan dan implementasi di Banda Aceh

Porgram penanggulangan kemiskinan di Banda Aceh dari 39 Dinas/SKPK yang terkait langsung pada pemberdayaan ekonomi 14 Dinas/SKPK (lihat table 11).

TABEL 13. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANDA ACEH 2012 [20]

Jenis Program	Penanggung jawab
• Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan • Program Sinkronisasi Pengentasan Kemiskinan • Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Konpetitif Usaha Kecil Menengah • Program Pengambangan Industri Kecil Dan Menengah • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri • Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif • Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan • Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Lembaga	• Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana • Dinas Sosial dan Tenaga Kerja • Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM) • Dinas Kelautan, Perikanan dan pertanian • Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

[20] *Sumber: Dokumen APBK Banda Aceh TA2010-2012 (di olah)*

Gampong • Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir • Program Pengembangan Perikanan Tangkap • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan • Penunjang Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkantoran	

Pada implemetasi program pemberantasan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2010-2012, dengan alokasi APBK pada Tahun 2010 sebesar Rp 509.293.991.469, terdapat program yang bersentuhan langsung dengan pemberantasan angka kemiskinan yaitu sebesar Rp.4,993,234,050. Kemudian dengan alokasi APBK Banda Aceh naik menjadi Rp 592.668.864.996, total program untuk sektor penanggulangan angka kemiskinan di seluruh Dinas/SKPK di Banda Aceh yaitu Rp.5,212,879,800.

Pada Tahun Anggaran 2012, APBK Banda Aceh naik dratis menjadi Rp 794.782.352.890. Sehingga alokasi untuk program pengentasan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh turut menanjak naik menjadi Rp18,526,185,092.

Kenaikan anggaran ini juga dapat di lihat dari masing-masing SKPK yang terkait langsung pada program penanggulangan kemiskinan. (grafik 9)

GRAFIK 9. TREND BELANJA SKPK BANDA ACEH

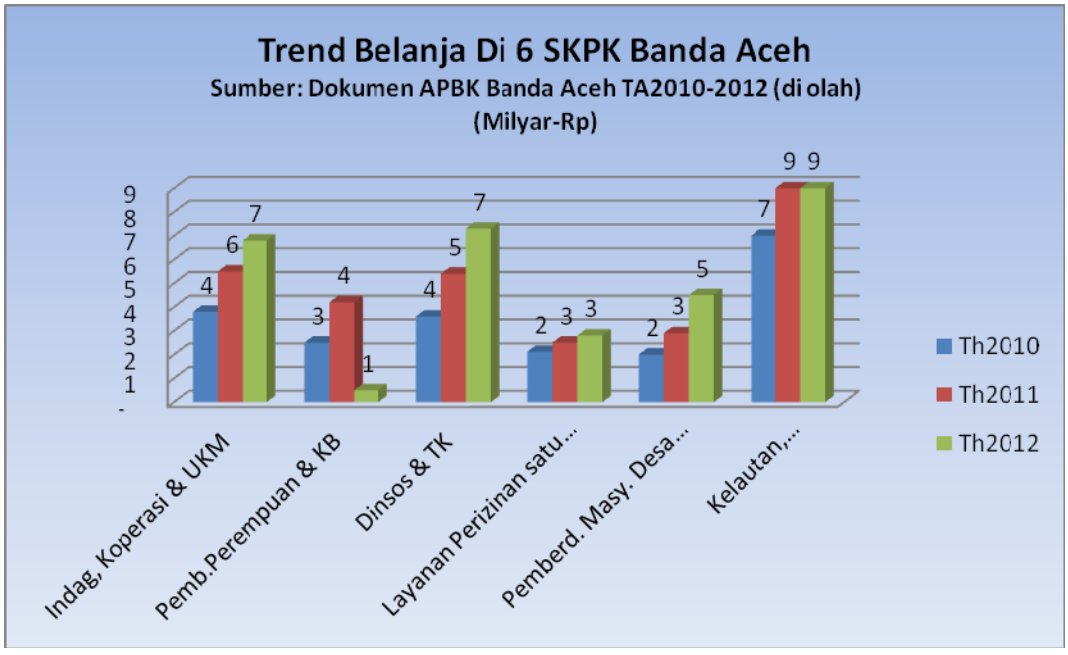

Dari data anggaran di 6 SKPK yang terkait langsung program penanggulangan kemiskinan Banda Aceh, jika di lihat trendnya terus meningkat, kecuali pada Bidang pemberdayaan perempuan menurun.

Selain itu program pengentasan kemiskinan yang ditujukan untuk pengembangan usaha mikro, tidak diikuti dengan penyediaan pasar dan juga tidak ada kegiatan untuk meningkatkan ketrampilan dan skill penerima bantuan modal, sehingga banyak bantuan modal tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk usaha. Serta tidak ada data tentang apa saja usaha yang dilakukan oleh perempuan dan apa saja yang dibutuhkan oleh perempuan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

5.1.3. Permodalan usaha melalui PNPM

Sebelum pengguliran dana PNPM membentuk BKM, kemudian di dalam BKM di bentuk unit-unit kerja yaitu unit pengelola lingkungan, pengelola keuangan, pengelolaan social, termasuk membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di desa. UPK kredit mikro desa, diharapkan bisa menjadi bank desa.
Namun dalam berjalannya program, ternyata program ini banyak menemui masalah, seperti pengembalian pinjaman macet, UPK yang dananya mengendap bank, turn over pengurus UPK tinggi, kredit tidak tepat sasaran dan disalah gunakan, fasilitator kurang cakap, tidak aktif dan kurang strategi untuk memotivasi masyarakat, budaya matrealistis dan konsumtif masyarakat. Selain itu persoalaan yang tak kalah penting adalah terkait partisipasi perempuan yang masih rendah. BKM sebagai lembaga pengambil keputusan masih di dominasi oleh laki-laki.

5.2. Kasus Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Luasnya mencakup 107,82 Km2 yang terdiri dari 6 Kecamatan (Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Utara) dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi oleh garis Khatulistiwa yaitu pada 0o 02’ 24” Lintang Utara sampai dengan 0o 05’ 37” Lintang Selatan dan 109o 16’ 25” Bujur Timur sampai dengan 109o 23’ 01” Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut.

Total jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2010 berjumlah 55.297 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan 275.706 dan laki-laki 274591.

GRAFIK 10 . TINGKAT KEMISKINAN KOTA PONTIANAK 2009-2011

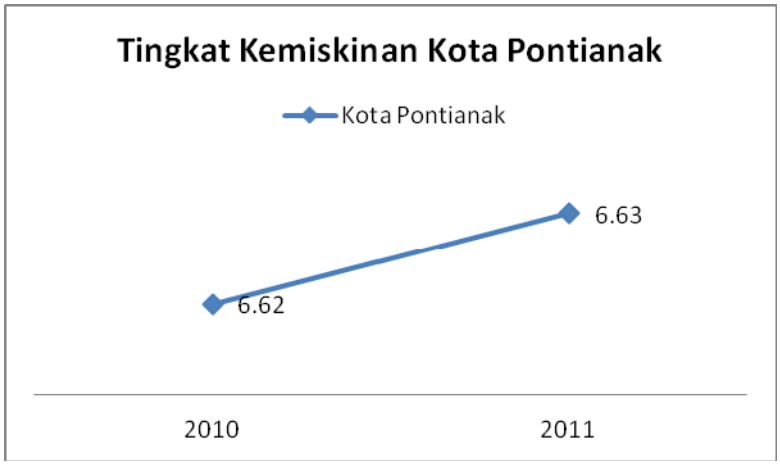

GRAFIK 11. TINGKAT PENGANGGURAN

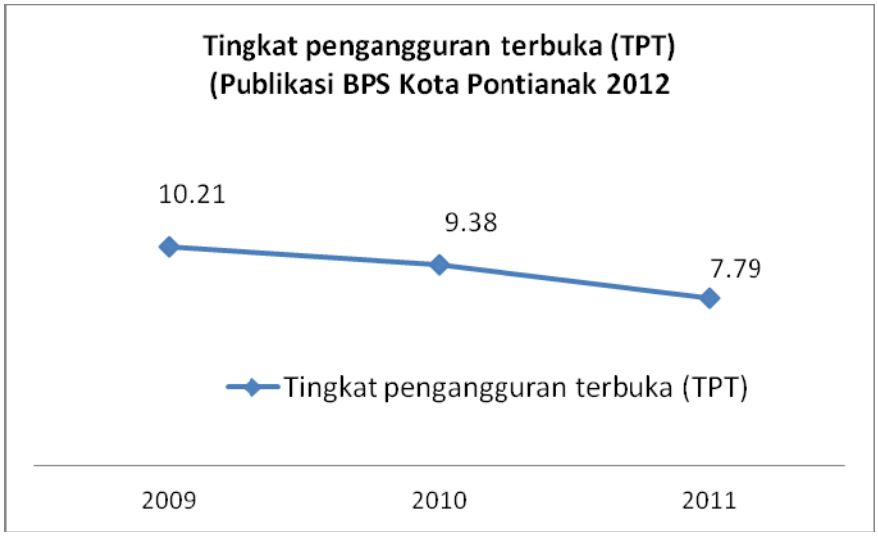

5.2.1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Pontianak

Regulasi	
Keputusan Walikota Pontianak No.643 Tahun 2011	Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak

5.2.2. Program penanggulangan Kemiskinan

Dalam Strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Pontianak di mengacu pada PP No. 15 Thn. 2010, Bab. III Pasal 3, di antaranya (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat

miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dari ke empat strategi tersebut kemudian diterjemahkan dalam program program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan dinas-dinas (SKPD) di kota Pontianak. Secara umum gambaran program penanggulangan kemiskinan Kota Pontianak dapat dilihat dalam table 11, berikut:

TABEL 14. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PONTIANAK

Program penanggulangan kemiskinan (terkait pengembangan usaha)	**Dinas / SKPD**
• Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan mendayagunakan sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat	Dinsos
• Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adala h serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.	Dinsos
• Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) – adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktuvitas anggotanya	Dinsos
• Peningkatan Peduli Perempuan dan Anak melalui beberapa kegiatan: - Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS) - Pembinaan Peranan Wanita (P2W) - Pembinaan terhadap sdm perempuan - Penanganan Kasus KDRT dan trafiking perempuan Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana Shelter Serta Operasional - Pembinaan dalam Rangka, Hari hari Besar Kewanitaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB)
• Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Dinas Perindagkop dan UKM
• peningakatan kualitas kelembagaan dan usaha bagi koperasi	Dinas Perindagkop dan UKM
• pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Perindagkop dan

	UKM
• peningkatan kemampuan teknologi industri	Dinas Perindagkop dan UKM
• pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Perindagkop dan UKM
• penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif	Dinas Perindagkop dan UKM
• pemberdayaan fakir miskin komunitas Adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Melalui kegiatan: - pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (KUBE) - pelatihan keterampilan bagi penayndang masalah kesejahteraan sosial	Dinas Sosial dan tenaga kerja
• peningkatan kualitas dan produksivitas tenaga kerja. Dengan kegiatan pelatihan pelatihan keterampilan pencari kerja kecantikan/ pangkas rambut	Dinas Sosial dan tenaga kerja
• perencanaan sosial budaya dengan kegiatan pembinaan dan pendampingan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (PNPM Mandiri P2KP)	Lintas SKPD terkait (PU,dalam negri, ,)

Dari gambaran beberapa program penanggulangan kemiskinan di kota Pontianak di atas tampak bahwa banyak program belum secara khusus ditujukan untuk penguatan ekonomi perempuan. Sementara itu dari program yang terkait langsung di antaranya program peningkatan kualitas dan produksivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan pangkas rambut (Dinas social dan tenaga kerja), PNPM mandiri melalui kegiatan SPP (Pengawasan Bappeda), dan program Peningkatan Peduli Perempuan dan Anak melalui P2WKSS, P2W (BPMPAKB).

Sementara itu program penguatan ekonomi yang berbasis keluarga dan komunitas (netral gender), di antaranya KUBE, UKS, UEP, program pengembangan kewirausahaan, pengembangan koperasi, komunitas adat terpencil, pengembangan umkm, pengembangan sentra ekonomi produktif dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Dari hasil FGD ditemukan ternyata masyarakat tidak banyak tahu tentang keberadaan program tersebut. Justru yang paling sering mengemuka dalam beberapa pernyataan peserta FGD adalah PNPM MK (mandiri perkotaan).

Sementara itu terkait program fasilitasi pemodalan melalui KUR, dana bergulir (dinas koperasi & UMKM) tidak banyak diperoleh informasi. Jika ada perbincangan tentang dana bergulir, justru yang mereka maksud adalah dana bergulir dari PNPM MK (Mandiri Perkotaan).

5.2.3. Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM di Kota Pontianak dimulai sejak Tahun 2005~2007 pelaksanaan dengan nama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di 7 kelurahan di Pontianak Timur. Pada Tahun 2007 P2KP dipayungi dengan Program PNPM yang disebut PNPM-P2KP. Pada Tahun 2008 menjadi PNPM-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dengan wilayah dampingan ditambah lagi dengan 13 Kelurahan di 4 Kecamatan.

Pada Tahun 2009 wilayah PNPM ditambah lagi dengan 9 Kelurahan di 4 Kecamatan. Sehingga Total wilayah Dampingan menjadi 29 Kelurahan di 6 Kecamatan. Hingga saat ini di Kota Pontianak telah terbentuk 29 BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan 29 PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan).

Berikut ini gambaran program fasilitasi permodalan usaha melalui PNPM MP di Kota Pontianak (lihat grafik 12)

GRAFIK 12. DANA ALOKASI EKONOMI BERGULIR KOTA PONTIANAK

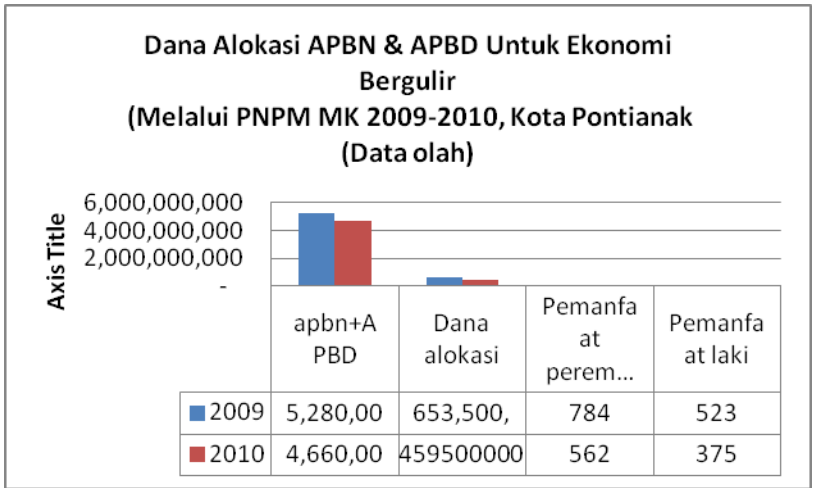

Dari informasi data tersebut menunjukkan anggaran untuk perkuatan permodalan menurun. Demikian juga untuk anggaran 2011 hanya sekitar 20 % dan tahun 2012 hanya sekitar 10 % dari dana APBD Kota Pontianak.

5.3. Kasus Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 wilayah kecamatan. Total jumlah penduduk berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2011 berjumlah 1.311.019 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan 668.649 dan laki-laki 642.370.

GRAFIK 13. TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KLATEN

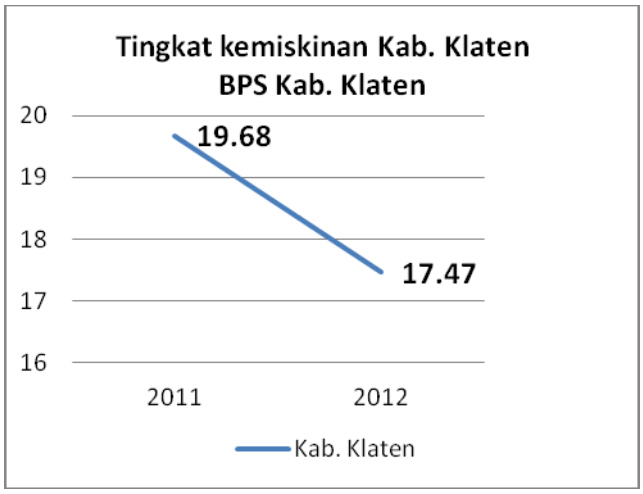

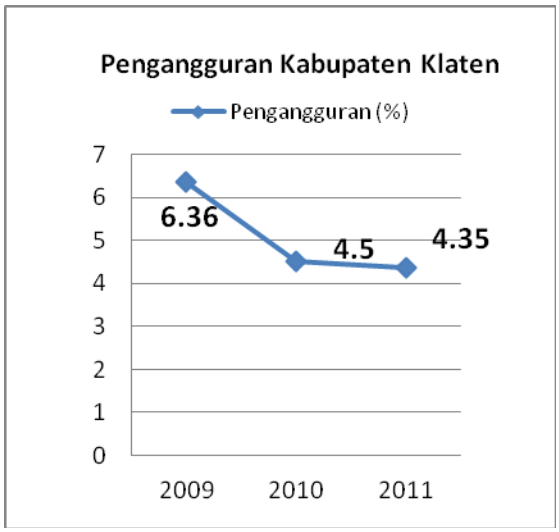

Sumber: BPS Kabupaten Klaten

Dari table di atas menunjukkan angka kemiskinan Klaten mengalami penurunan . Demikian juga Tingkat pengangguran terbuka (TPT) TPT terus menurun 6,36 (2009), 4,50 (2010), 4,35 (2011).

5.3.1. Kebijakan penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Klaten

Pada kabupaten Klaten tidak banyak regulasi yang mendorong suksesnya penanggulan kemiskinan. Regulasi yang ada yang terkait langsung dengan program ini yaitu Perda No.5 TH.2011 Arah Kebijakan Pembangunan. Substansi dalam Perda yaitu (1) Arahan pelaksanaan penaggulangan kemiskinan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergitas dan terencana (Kebijakan ekonomi, perluasan kerja, pengurangan kesenjangan antar wilayah, pemenuhan hak dasar). (2) Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Klaten.

Terkait dengan regulasi fasilitasi permodalan dapat disebutkan di antaranya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten. Substansi pada regulasi ini di antaranya menjelaskan fungsi PD BPR yang meliputi: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka; (b) memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah; (c) melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;

Selain dari perda-perda yang telah di atas masih ada beberapa perda lain khususnya terkait perda tentang dana penyertaan Pemda pada perusahaan daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006).

Namun sayang sekali dari sekian banyak perda yang ada di Kabupaten tidak ada yang berbicara tentang penguatan institusi masyarakat yang berguna dan berperan besar pada kelompok-kelompok miskin, dalam hal ini misalnya lembaga koperasi.

Terkait dengan pangarusutamaan gender pemerintah kabupaten klaten juga membuat Perda Nomor 29 Tahun 2008, namun sayang perda ini hanya berbicara tentang pengorganisasi Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten belum pada substansi persoalan gender.

5.3.2. Program penanggulangan kemiskinan dan implementasi di Kabupaten Klaten

Tabel di bawah ini merupakan gambaran program penanggulan kemiskinan Kabupaten Klaten yang mengemuka saat FGD.

TABEL 15. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB KLATEN

Program/Kegiatan Penanganan KK Miskin Absolut/Umum	
Kegiatan	SKPD
• Pemberian raskin • Jamkesmas • Rehab rumah • Bantuan sandang dan kebutuhan hidup lain-lain	• Bagian perekonomian • Dinas kesehatan • Bapermas/Pokja forum • Bagian kesra/dinsosnakertran
Program/Kegiatan Penanganan Kk Miskin PotensiTidak Punya Asset/Khusus	
• Pelatihan ketrampilan & pemberian alat serta bantuan modal • Pelatihan ternak dan bantuan ternak • Bimbingan dan pendampingan 1 tahun • Akses kredit ke LKNB	• Dinsosnakertrans & Disperindagkop & UMKM • Dinas pertanian • Bapermas & PNPM & LKM/LSM • BMT/Koperasi/LKNB
KK Miskin Potensi Punya Asset	
Penanganan sama dengan yang tidak punya asset ditambah dengan : • Bantuan Bibit untuk pertanian dise- • suaikan dengan kondisi tanah (bibit • padi atau hortikultura) • Bantuan alsintan • Bimbingan & pendampingan Pertanian • Pelatihan & bantuan alat untuk industri • olahan.	• Dinsosnakertrans& Disperindagkop & UMKM • Dinas pertanian • Bapermas & PNPM & LKM/LSM BMT/Koperasi/LKNB

Pada tingkat implementasi program kemiskinan Kabupaten Klaten dari hasil temuan FGD ternyata dinilai banyak program yang tidak tepat sasaran, informasi program yang kurang, masyarakat miskin masih sulit mendapatkan akses permodalan, pemerintah dianggap tidak mengetahui kebutuhan orang miskin dan pemerintah di nilai tidak bisa mengelola sumber daya yang ada di masyarakat. Untuk menyimak lebih detil dapat di lihat pada catatan-catatan hasil di bawah ini.

1. **Tugiyati**, data jamkesmas sampai saat ini belum menyasar masyarakat miskin, yang mendapat tidak dimanfaatkan, dan yang benar-benar butuh malah tidak mendapatkan. Jamkesda hanya diplotkan 1 tahun dan sudah ditentukan, kalau tidak digunakan kan mubasir?
2. **Cawas**, harus ada evaluasi PNPM, pelaku UPK realita banyak yang kocar kacir. Masalah yang ada, kalau dicermati system pemerintah memang amburadul, pinginnya bersih korupsi, tapi yang dipakai masih pola lama, misalnya rehap rumah, dari atas anggaran sampai bawah itu berkurang banyak, ini mungkin efek politik uang, bagaimana merubah ini?. Jamkesmas atau jamkesda beberapa kali lelang kok gagal, apa alasannya?
3. **Surti**, bantuan untuk warga ketika rumahnya roboh, ada pendataan dari desa, terus dipanggil ke kecamatan, ada birokrasi yang dating dan memberi sembako. Yang datang dari kabupaten juga hanya mendapat sembako, maunya dapat bantuan yang dapat untuk membangun kembali?
4. **Aditya**, apakah diskusi ini sungguh-sungguh akan melaksanakan hasil kesimpulan. Apakah kita sudah merdeka ketika memperingati 17 Agustus? Apakah ketika banyak indomart dengan pasar apakah itu sesuai UU atau tidak? Program pelatihan di desa-desa, kalau sudah surplus produksi mau dijual kemana? Perempuan partisipasi sudah terlihat, namun budaya orangtua masih patriarkhi, bagaimana mengutamakan yang muda/perempuan?
5. **Wardiyono**, kalau ada beras miskin kualitas buruk, apakah akan diganti beras kualitas bagus, apakah ada sanksi? Kenapa banyak hal terbentur aturan yang tidak terselesaikan?. Sebenarnya kita miskin hati, menjadikan serakah, sebenarnya bumi kita cukup untuk memenuhi kebutuhan semua rakyat, namun karena sifat serakah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan 1 orang? Pemerintah salah urus
6. **Saparini**, program kesehatan jamkesmas/jamkesda, kenapa tidak mengcover papsmear utk perempuan, bagaimana kesehatan produksi perempuan akan melahirkan dengan sehat. Kenapa raskin menjadi lingkaran setan, banyak tidak tepat sasaran, setelah dapat banyak yang dijual? Pendataan yang kurang tepat,

sehingga sasaran program tidak tepat?

7. **Wahini**, 5 pilar Negara sudah banyak ditinggalkan Indonesia, apabila ini benar-benarnya dijalankan maka Indonesia akan sejahtera. Kita seringkali menggantungkan hidup dari orang lain, kita merdeka tapi sebenarnya tidak merdeka?
8. **Jumirin**, raskin harus tepat untuk orang miskin, ada kejadian raskin yang dijual di selepan untuk diselep lagi. Jamkesmas kadang sulit diakses? BOS mohon benar-benar untuk kebutuhan murid!

(Sumber: hasil FGD Klaten)

Di Kabupaten Klaten telah terbentuk TKPK, sementara itu di Tingkat Kecamatan telah ada Camat sbg ketua yang memiliki unsur BPS, KB, Puskesmas, UPTD, Pendidikan, PPL, PSK, PNPM, Staf Kec. Dll. Sedangkan untuk tingkat Desa terdapat unsur LKMD, BPD, RW, RT, PNPM, Bidan Desa, Relawan Desa dll. Namun dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di antara dinas-dinas terkait belum saling bekerjasama. Misalnya terkait data penduduk miskin.

Bab 6. Rangkuman Temuan 3 (tiga) Daerah (Klaten, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak)

6.1. Sintesis hasil Kajian Program Pengembangan Ekonomi di Daerah

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, seharusnya pemerintah mempunyai peranan dalam membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Paradigma yang memandang koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya remeh, lemah, terbelakang dan pantas dikasihani seharusnya sudah meulai dirubah.

Program pembangunan nasional diorientasikan pada masalah penganggulangan kemiskinan, tenaga kerja perdesaan, ketahanan pangan, pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi. Program-program pemberdayaan hendaknya tidak seperti program *charity,* yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, program pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM.

Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan program melalui melalui Bantuan Langsung Masyarakat yang berbasis sektor dan menyebar di kementerian/lembaga dan didistribukan ke daerah melalui bantuan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah dan sektor. Secara praktek lapangan bantuan tersebut disalurkan setelah masyarakat mengajukan proposal yang

sebelumnya dilakukan seleksi secara ketat. Selain lewat proposal, pemberian bantuan bisa saat Bupati atau Wakil Bupati melakukan kunjungan kerja di wilayah setempat.

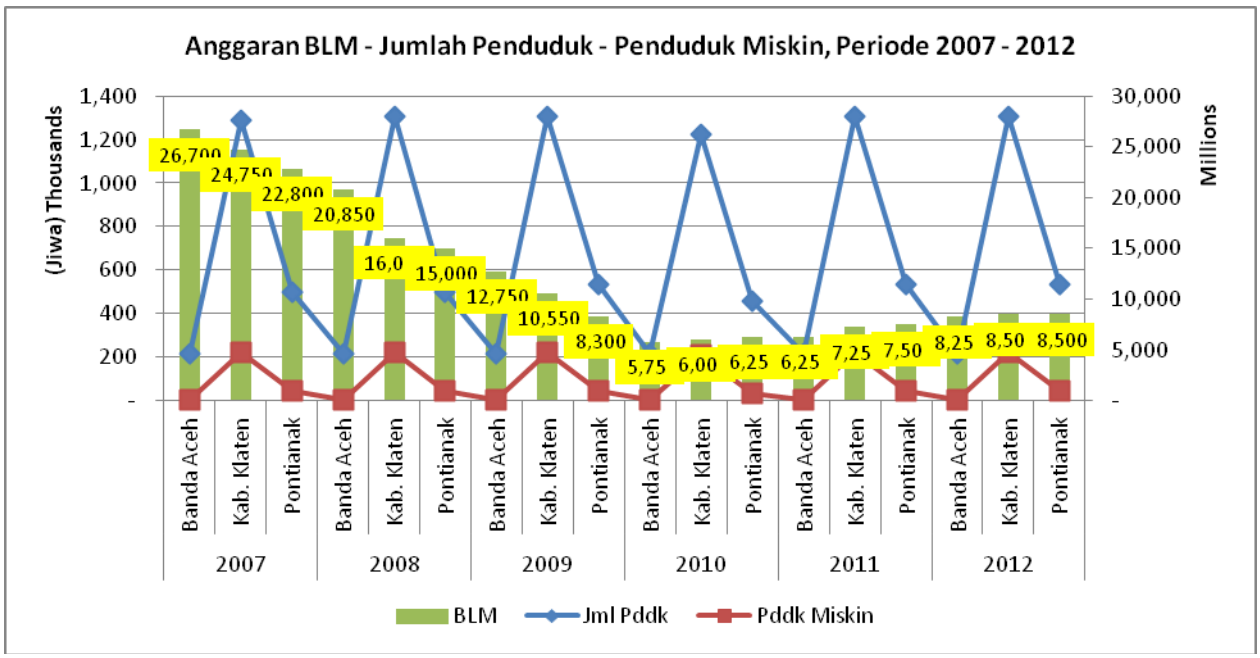

Sumber: Kementerian Kesejahteraan Rakyat

Dari hasil analisis, dalam periode 2007 – 2011 angka kemiskinan di ketiga daerah tidak mengalami penurunan walaupun secara nominal anggaran untuk bantuan langsung masyarakat tiap tahun didistribusikan ke daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rata – rata alokasi BLM ke Banda Aceh Rp 13,4 milyar, Kab. Klaten Rp 12,2 milyar, dan untuk daerah Pontianak Rp 11,4 milyar. Kabupaten Klaten rata – rata jumlah penduduk miskin sekitar 218.370 jiwa (17% dari total penduduk 1.288.049 jiwa) yang tersebar di 17 kecamatan. Kemudian untuk Banda aceh rata – rata jumlah penduduk 2.14.707 jiwa dengan rata – rata jumlah penduduk miskin sebesar 3.500 (2%) yang tersebar di 9 kecamatan, dan Kota pontianak rata – rata jumlah penduduk sebesar 509.034 dengan rata – rata jumlah penduduk miskin sebesar 44.120 jiwa (9%) yang tersebar di 6 kecamatan.

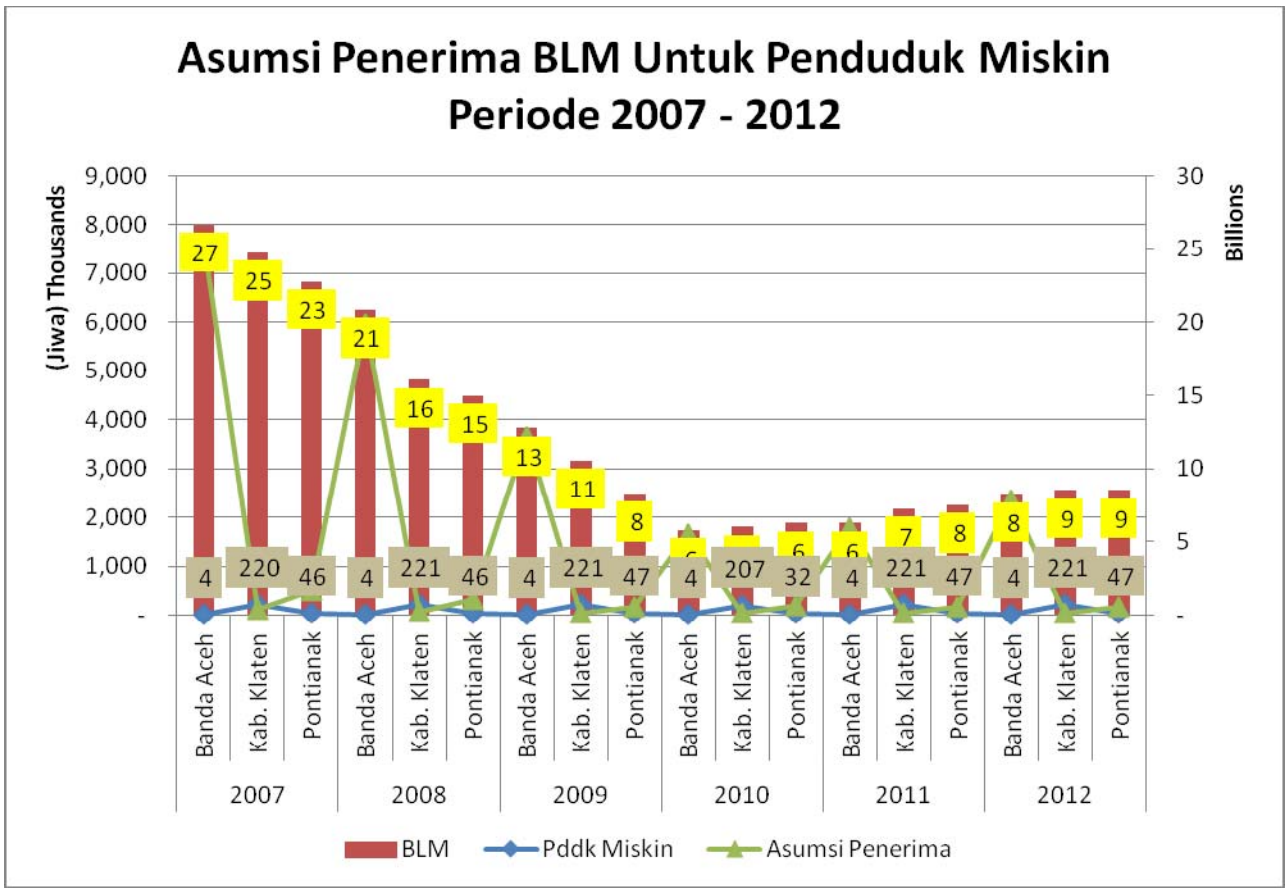

Angka kemiskinan rata-rata di Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain dengan asumsi menerima BLM untuk penduduk miskin hanya Rp 55.559/orang miskin/tahun, jika dibandingkan dengan banda aceh yang hanya 2% jumlah rata – rata penduduk miskin asumsi menerima BLM mencapai Rp 3.835.714/orang miskin/tahun, sedangkan untuk kota Pontianak dengan rata – rata jumlah penduduk miskin 9% asumsi menerima BLM Rp 256.301/orang miskin/tahun.

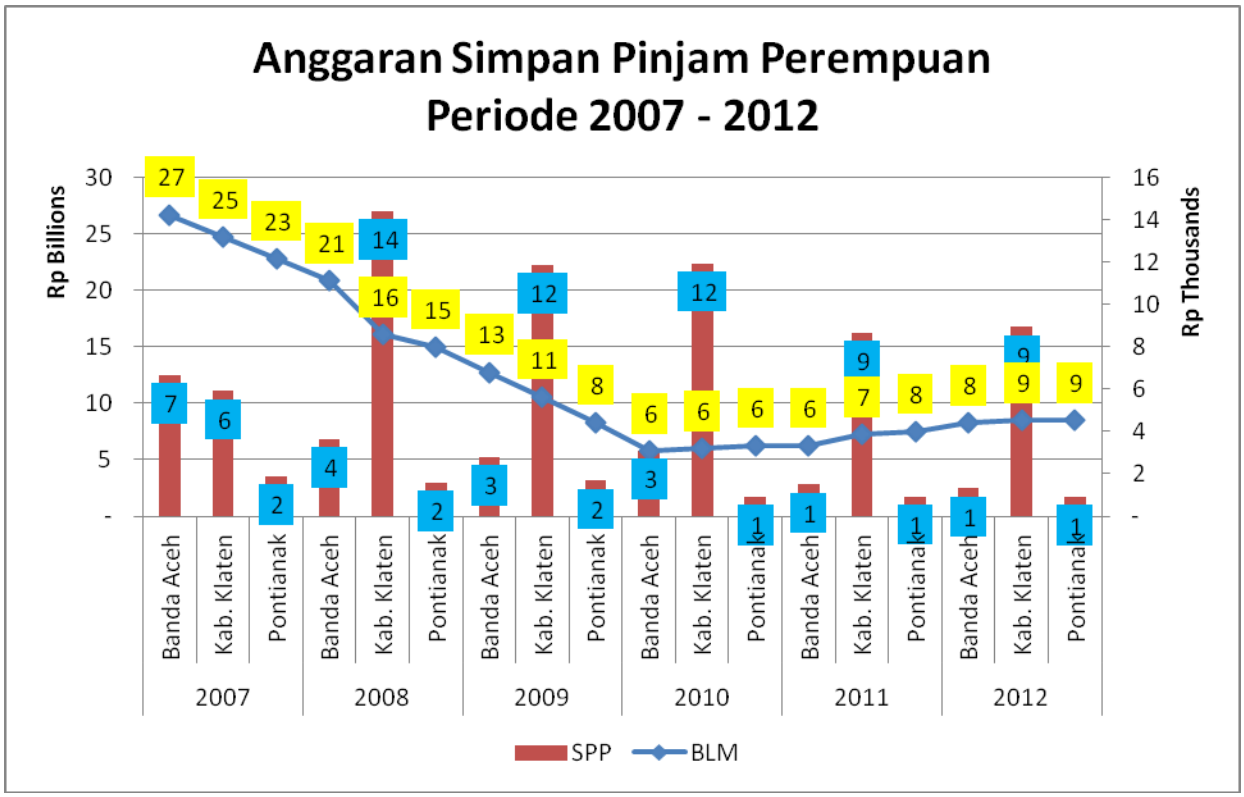

Simpan pinjam perempuan (SPP) yang anggarannya merupakan bagaian dari dana program PNPM-MP, yang disisihkan sebesar 25% dari anggaran BLM. Hanya kabupaten Klaten untuk alokasi anggaran SPP mengalami kenaikan tiap dalam periode 2007 – 2011, dengan rata – rata alokasi anggaran sebesar Rp 10.283 juta/tahun untuk 17 kecamatan, untuk pontianak dan banda aceh cenderung mengalami penurunan dengan masing – masing alokasi rata – rata sebesar Rp 1.320 juta/tahun untuk 6 kecamatan dan Rp 3.167 juta/tahun untuk 9 kecamatan.

6.2 Isu-isu penting

Aspek permodalan	Aspek pemberdayaan
• Banyak pelaku UMK perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses modal • Bunga pinjaman Bank tinggi sehingga kelompok perempuan enggan meminjam • Administrasi yang rumit. • Kredit tidak tepat sasaran dan disalah gunakan • Dana bergulir tidak disesuaikan dengan jenis usaha masyarakat	• Tingkat partisipasi khususnya perempuan masih rendah • Kuranganya fasilitator kelompok dengan masyarakat • Kuranganya informasi tentang anggaran pemda • Rata-rata perempuan penerima modal kurang memiliki kemampuan pengelolaan usaha yang baik, seperti produk dan teknik pengemasan kurang *variatif*. • Sebagian besar perempuan belum

• Tingginya Nepotisme di desa dalam pembentukan BKM didesa • Program SPP terlihat baru sebatas penyaluran modal usaha bagi kelompok perempuan. • Program SPP masih belum direncanakan secara holistic untuk pengentasan perempuan miskin. • Kemampuan penggalian modal usaha masih lemah • Perempuan kepala keluarga (Pekka) merupakan kepala keluarga untuk mendapatkan modal sangat sulit. Karena untuk mendapatkan pinjaman harus menyertakan tanda tangan suami	memiliki perencanaan usaha dan terkesan ikut-ikutan. • Pemerintah tidak memahami kebutuhan orang miskin, mulai dari musyawarah desa hingga musrenbangda tidak melibatkan orang miskin. •

Iklim Usaha	**Harmonisasi kebijakan – program**
• Pembangunan infrastruktur di daerah target yang belum menyinergikan potensi sumber daya ekonomi lokal • Belum ada penegakan hukum pada pasar modern yang melanggar zona batas usaha, jam operasi, dll • Akses pasar yang masih sulit •	• Belum ada sinkronisasi data di antara instansi pemerintah dalam pengguliran dana (terkait basic data perlindungan sosia) – cenderung terjadi ego sektoral di kalangan dinas-dinas • Tumpang tindih dana bergulir pada masyarakat. Contoh program permodalan di Aceh : APBA, APBK, WDC (Kasus wilayah Aceh) • Sulitnya sinerigisitas antara pihak-pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Kasus: tidak nyambungnya usulkan di musrembang dengan prioritas yang dilakukan olseh SKPD terkait (kasus Pontianak). • Belum terintegrasinya data Pronangkis dari SKPD lintas sektor (Kasus Kota Pontianak) • Pengajuan proposal ke dinas terkait untuk akses pelatihan-pelatihan bagi UMKM yang menjadi program di disperindag. Budget yang dititipkan kadang tersedia di setiap SKPD namun dalam kapasitas yang sangat terbatas. • Sulitnya koordinasi antara SKPD membuat berbagai program tidak bisa dilaksanakan antara SKPD.

Bab 7. Kesimpulan

7.1. Kesimpulan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah telah mengintrodusir banyak kebijakan dan program, salah satunya adalah pada sektor UMKM. Sektor ini dianggap mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Terbukti pada masa krisis 1997/98 hingga sekarang memiliki daya lentur dan mampu menjadi katup ekonomi, khususnya ketahanan ekonomi keluarga. Jumlah sektor umkm ini sangat besar dan jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Namun begitu dilihat dari kontribusi terhadap PDB nasional sektor UMKM ini masih jauh dibandingkan dengan sektor usaha besar yang jumlah unitnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih belum banyak berkembang. Padahal jika sektor ini benar-benar diberdayakan, setidaknya pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan sekitar 53 Juta penduduk sektor usaha mikro yang 60 % nya (atau sekitar 31.924.500) adalah perempuan di sektor usaha mikro.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mengembangkan umkm. Terkait dengan program-progam permodalan ini di antaranya program KUR,KUBE,PNPM dsb. Namun jika dilihat dari banyaknya program-program yang ada menunjukkan bahwa paradigma pemerintah masih menitikberatkan pada aspek permodalan saja. Padahal upaya menumbuh kembangkan sektor UMKM tidak sekedar pemberian aspek permodalan. Sehingga program penguatan permodalan usaha pada satu sisi, tidak dibarengi dengan program-program lain yang mendukung, seperti peningkatan keterampilan, akses pasar dll. Sehingga banyak kasus unit-unit usaha yang dibiayai tidak berkembang dan bahkan lenyap.

Selain pada aspek teknis usaha, pola-pola penyaluran dana bergulir untuk permodalan usaha juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan belum adanya sinergisitas kebijakan dan program yang dijalankan. Beberapa indikator yang menunjukkan kurang sinerginya distribusi dana bergulir sebagai akibat kurang memanfaatkan data-data basic perlindungan sosial yang telah dibuat oleh TKPKD. Pada temuan kasus di 3 wilayah menunjukkan bahwa beberapa dinas yang memiliki anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tetapi tidak memanfaatkan data ini. Inilah yang sering di sebut sebaga ego sektoral di antara dinas-dinas. Sebagai dampaknya banyak program yang tidak tepat sasaran, pengguliran dana tumpang tindih, dan tidak ada pengawalan program secara terpadu.

Demikian juga terkait penyelenggaraan dana bergulir, meski telah ada payung hukum tentang pengelolaan dana bergulir (Permen Keuangan No 99/PMK 05/2008, Permendagri No. 61 tahun 2007) yang mengamanatkan perlunya unit khusus pada dinas-dinas yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran dana bergulir, namun pada tingkatan daerah (di 3 daerah kajian) tidak ditemukan unit-unit khusus yang dibentuk untuk layanan permodalan.[i] Sehingga hal ini

berdampak selain tidak adanya sinergi pusat dan daerah, juga mengakibatkan sulitnya mendapatkan akses (informasi dan sumber permodalan).

Selain program pemberdayaan UMKM, pemerintah juga menjalankan program PNPM (Klaster 3) yang didalam substansi programnya juga ingin mendorong kemandirian masyarakat miskin melalui usaha (usaha kecil). Tercermin dalam beberapa kegiatannya di antaranya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jika dilihat dari kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan perempuan program PNPM inilah yang salah satunya mengambil kelompok perempuan sebagai sasaran program. Tetapi program ini masih berorientasi pada pemberian bantuan permodalan belum memasukan paket sinergi dengan program-program peningkatan kapasitas usaha, akses pasar dsb, sehingga yang muncul program ini lebih bersifat 'charity'

Dalam program PNPM pemerintah juga mulai melibatkan peran perempuan dalam perencanan pembangunan di daerah. Tetapi keterlibatan perempuan ini juga masih rendah, misalnya keterlibatan perempuan dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sehingga keputusan-keputusan dalam yang muncul sering tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan.

7.2. Rekomendasi

1) Pemerintah perlu mendorong pengembangan UMKM yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai salah satu solusi untuk penanggulangan kemiskinan. Sektor ini memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu 53 Juta pelaku usaha mikro 60 % nya pelaku usaha perempuan (Kemenkop dan UMKM 2010). Demikian juga sektor ini banyak dimasuki oleh kelompok miskin dan rentan miskin. Jadi dengan dengan mengembangkan usaha mereka berarti telah melaksanakan program nyata dalam penanggulangan kemiskinan setidaknya sekitar 31,924,500 penduduk Indonesia (miskin dan rentan miskin).

2) Pemerintah perlu mendorong iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh kembang UMKM. Di antaranya perlu membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi pelaku usaha mikro kecil. Selama ini pemerintah lebih menitikberatkan program fasilitasi permodalan, tetapi abai terhadap fenomena persaingan tidak sehat. Pada pasar domestic para pelaku usaha mikro kecil kini telah berhadap-hadapan dengan menjamurknya pasar-pasar modern. Sementara itu mereka juga masih menghadapi persaingan usaha yang telah mengglobal sebagai efek dari perdagangan bebas. (misal, FTA China, dll).

3) Pemerintah perlu mendorong tumbuh kembang lembaga koperasi, karena dapat berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan usaha mikro kecil, peningkatan kapasitas, akses market, dsb. Selain itu, koperasi secara kelembagaan dimiliki oleh seluruh anggota, sehingga berpeluang besar bagi peningkatan kesejahteraan anggota.

4) Program-program terkait bantuan permodalan usaha telah banyak digulirkan oleh pemerintah. Namun masyarakat miskin sebagai target sasaran ternyata masih banyak

terkendala dalam mengaksesnya. Sehingga justru program-program fasilitasi permodalan ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan elit di masyarakat (mulai dari tokoh-tokoh desa, partai dsb). Sehingga pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan terkait fasilitasi permodalan UMKM yang ada selama ini. Misalnya perlunya penyederhanaan birokrasi dan prosedur dalam penyaluran permodalan usaha.

5) Pemerintah perlu memberikan program peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha yang telah mendapat dana bergulir. Program ini meliputi aspek pendampingan yang terdiri dari (pelatihan produksi, manajemen usaha, informasi sumber permodalan usaha, hingga penciptaan akses pasar). Untuk melaksanakan ini pemerintah dapat bermitra dengan pihak-pihak terkait (koperasi, perbankan,LSM, mahasiswa, perusahaan, dsb).

6) Dalam menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan perempuan, data kemiskinan memegang peranan penting, namun sayangnya data terpilah, khususnya di sektor usaha selama ini belum tersedia. Sehingga ketiadaan data ini menyebabkan banyak persoalan. Seperti program salah sasaran, pengguliran data tumpang tindih, dan menyulitkan ketika berbagai stakeholder, khususnya pemerintah untuk membuat kebijakan/program/penganggaran yang affirmative perempuan (pelaku usaha mikro).

7) Pemerintah perlu mengembangkan instrumen-instrumen monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program yang selama ini telah dianggap responsive gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
   - PNPM melalui kegiatan SPP secara konsep baru bersifat (affirmatif action) belum merupakan arus besar dalam program yang berbasis jender, sehingga lebih berfungsi sebagai program yang seolah-olah telah menjadikan PNPM responsive jender. Sehingga PNPM melalui SPP belum memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan perempuan .

8) Program penanggulangan kemiskinan perlu memberlakukan kuota keterlibatan perempuan dalam partisipasi, akses, pengambilan keputusan dan kontrol yang berkaitan dengan program-program pengembangan usaha. Keterlibatan perempuan miskin dalam perencanaan program yang berkaitan perempuan, selama ini hanya bersifat formalitas, tetapi belum melibatkan perepuan secara substantive (perencanaan – pengambilan keputusan - kontrol). Sebagai dampaknya keputusan-keputusan yang muncul dalam pembangunan sering tidak relevan dengan kebutuhan perempuan. Secara khusus dalam kasus PNPM, porporsi jumlah perempuan dan laki-laki yang menjadi anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sangat senjang. Padahal BKM ini berperan penting dalam pengambilan keputusan penting terhadap progam yang akan dijalankan di masyarakat.

9) Perlu mengefektifkan peran TKPK Nasional/Daerah sebagai lembaga yang berwenang melakukan koordinasi nasional dan daerah secara integratif.

Daftar pustaka

Buku:

Lestari, Sri. Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang dan Masa Depan, Bandung, Fokus Media, 2012

Stamboel, Kemal A. Panggilan Keberpihakan, Strategi mengakhiri kemiskinan Di Indonesia, Jakarta, Gramedia, 2012

Shiva, Vandana. Bebas dari pembangunan: Perempuan Ekologi dan perjuangan hidup di India, yayasan obor, Jakarta, 1998

Internet:

Mukhaer Pakkanna, "Perempuan Kemiskinan dan Ekonomi Pancasila," http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/06/perempuan-kemiskinan-dan-ekonomi-pancasila/, diakses tanggal16 September 2012

Bagong Suyanto, "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin," (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_%20Bagong.pdf, akses tanggal 10 Oktober 2012) di akses 5 Oktober 2012

Kemenkop miliki 4 agenda prioritas, "http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=792:kemenkop-miliki-4-agenda-prioritas&catid=50:bind-berita&Itemid=97" diakses tanggal 8 November 2012

Skema penyaluran kredit usaha rakyat, "http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=351," diakses 8 November 2012

Target penyaluran KUR 2012 sebesar Rp 30 triliun, http://nasional.kontan.co.id/news/target-penyaluran-kur-2012-sebesar-rp-30-triliun, diakses, 9 November 2012

http://www.depkop.go.id/ akses 3 Orktober 2012

Di olah dari artikel, *Penyaluran KUR Capai Rp 24 Triliun*, http://www.setkab.go.id/berita-6400-hingga-september-2012-penyaluran-kur-capai-rp-24-triliun.html, (di akses tanggal 9 November 2012)

Data Kemenkop dan UMKM, 2010, *Daya Tahan Perempuan dalam Mengelola UKM*, http://www.infobanknews.com/2012/06/daya-tahan-perempuan-dalam-mengelola-ukm/ akses 10 Oktober 2012

http://www.bumn.go.id/ptpn8/tanggung-jawab-sosial/program-kemitraan/ (data di olah) akses 15 Oktober 2012

Sumber Majalah:

- Majalah Bisnis UMKM, Ed.No. 44/IV/Oktober 2012,hal.6
- Infobank*,No.403 Oktober 2012*, hal.33

Data statistik

- Statistik Gender 2011
- BPS Pembangunan manusia berbasis gender 2011
- TNP2K, indicator kesejahteraan daerah (jawa tengah)
- TNP2K, indicator kesejahteraan daerah (Aceh)
- TNP2K, indicator kesejahteraan daerah (Kalimantan Barat)
- BKKBN, Profile hasil pendataan keluarga 2011
- BPS,Statistik Indonesia 2011
- BPS,Statistik Kesejahteraan Rakyat 2010
- BPS,Profil_Data_Kesehatan_Indonesia_Tahun_2011
- BPS, Profil Industri Mikro dan Kecil 2010
- BPS,Pendapatan Nasional Indonesia 2008-2011
- BPS,Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2012
- BPS,Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2010
- BPS,berita_resmi_statistik_ukm_bps_2008
- BPS, BDA.dalam.angka.02011
- BPS, BRS Kemiskinan Maret 2012
- BPS,Berita Resmi Kemiskinan Aceh, Maret 2011
- Statistik Daerah Aceh,2011
- Indikator.sosek,2011
- BPS.Kemiskinan.Booklet_Mei_2012
- IPM prov jawa tengah
- IPM Provinsi Jateng Tahun 2011
- BPS,berita resmi statistik (BRS) pengangguran jateng 2011

Hasil Penelitian:

Anasta, Ayu, dkk. Penelitian kebijakan, Perempuan Anggota DPR RI dan Proses pembuatan Kebijakan Publik: Rancangan perubahan Undang-Undang tentang pemilihan Umum, Women Researh Institute, 2012

Peraturan perundang-undangan Indonesia

- Peraturan Presiden RI No 15 /2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Inpres RI Nomor 1 /2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- Inpres No 3 / 2010 tentang program pembangunan berkeadilan
- Peraturan Presiden RI No. 54 /2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- PerMenDagri No 42 /2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- KepMen Koord Bid.Kesra No.25/kep/menko/Kesra/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM Mandiri
- Instruksi Presiden No.9 / 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Keputusan Presiden No 5 / 2010 Tentang Rencana Pembangunan. Jangka Menengah Nasional Tahun *2010*–2014
- UU No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- UU No. 17 tahun 2012 Tentang Koperasi
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Inpres No 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
- Inpres No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Permen Keuangan No 99/PMK 05/2008 tentang. Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian. Negara/Lembaga
- Permendagri No 61 tahun 2007 Tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum
- Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
- KepMen Kesra No 25/kep/menko/Kesra/VII/2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Inpres No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Permen Keuangan No 99/PMK 05/2008 Tentang: Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
- Permendagri No 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang. Program Kemitraan *BUMN* dengan Usaha Kecil dan Menengah
- KepMen Koord Bidang Kesra No 25/kep/menko/Kesra/VII/2007 Tentang. Pedoman Umum. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)
- Perda Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengarustumaan Jender
- Keputusan Walikota Pontianak No. 643 Tahun 2011 Tentang Pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak

Daftar Tabel

Tabel 1. Situasi Gap Kualitas Perempuan Dan Laki-Laki
Tabel 2. Fokus Kajian Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Tabel 3. Unsur-Unsur Masyarakat Yang Terlibat Dalam Kajian
Tabel 4. Regulasi Penanggulangan Kemiskinan
Tabel 5. Kebijakan Permodalan Tingkat Pusat
Tabel 6. Kebijakan Non Permodalan
Tabel 7. Program Pemberdayaan UMKM
Tabel 8. Kredit Terhadap Pelaku Usaha
Tabel 9. Realisasi Dana Bergulir
Tabel 10. Laporan Dana Tersedia Program Kemitraan 2007 - 2011 (dalam Rp)
Tabel 11. Pengelompokkan PNPM
Tabel 12. Program Penanggulangan Kemiskinan Banda Aceh 2012
Tabel 13. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak
Tabel 14. Program Penanggulangan Kemiskinan Kab Klaten

Daftar Grafik/Bagan

Grafik 1. Perkembangan penduduk miskin Indonesia 2005 – 2012
Grafik 2. Profil Umkm 2010
Grafik 3. Pertumbuhan Koperasi Dan Keanggotaan 2009-2012
Grafik 4. Realisasi Akumulasi Kur 2007-2012
Grafik 5. Realisasi Dana Bergulir Lpdb 2008-2012
Grafik 6. Alokasi Dana Pnpm Mandiri 2010-2012
Grafik 7. Tingkat Kemiskinan Banda Aceh
Grafik 8. Tingkat Pengangguran Banda Aceh
Grafik 9. Trend Belanja Skpk Banda Aceh
Grafik 10 . Tingkat Kemiskinan Kota Pontianak 2009-2011
Grafik 11. Tingkat Pengangguran 2009-2011
Grafik 12. Dana Alokasi Ekonomi Bergulir Kota Pontianak
Grafik 13. Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Klaten

Daftar singkatan

A

AK	: Angkatan kerja
AKB	: Angka kematian bayi
AKI	: Angka kematian ibu
APBN	: Anggaran pendapatan dan belanja negara
ASPPUK	: Asosiasi pendamping perempuan usaha kecil
APDB	: Anggaran pendapatan dan belanja daerah
ADB	: Asian development bank

APBK : Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten
APBA : Anggaran pendapatan dan belanja aceh

B

BPS : Badan pusat statistic
BLT : Bantuan langsung tunai
BSM : Bantuan siswa miskin
BUMN : Badan usaha milik Negara
BLU : Badan layanan umum
BLUD : Badan layanan umun daerah
BLM : Bantuan langsung masyarakat
BKM : Badan keswadayaan masyarakat
BPMPAKB : Badan pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak dan keluarga berencana
BPD : Bank pembangunan daerah

C

CSO : Civil society organization

F

FGD : Fokus group discussion
FTA : Free trade agreement

G

GDI : Gender development indeks

I

IPM : Indek pembangunan manusia
IJP : Imbal jasa penjaminan
IPG : Indek pemberdayaan gender
IKK : Indeks keparahan kemiskinan

J

JAMKESMAS : Jaminan kesehatan masyarakat
JSLU : Jaminan sosial lanjut usia

K

KUPEDES : Kredit usaha pedesaan
KUK : Kredit usaha kecil
KCK : Kredit candak kulak
KUKESRA : Kredit usaha kesejahteraan rakyat
KUR : Kredit usaha rakyat
KUBE : Kelompok usaha bersama
KEMENKOP UKM : Kementerian koperasi usaha kecil dan menengah

KAT : Komunitas adat terpencil
KB : Keluarga berencana

L

LPDB : Lembaga pengelola dana bergulir
LKM : Lembaga keswadayaan masyarakat
LKNB : Lembaga keuangan non bank
LSM : Lembaga swadaya masyarakat
LKMD : Lembaga ketahan masyarakat desa

M

MDG's : Millennium development goals
MAD : Musyawarah antar desa

P

PKBL : Program kemitraan bina lingkungan
PYB : Penduduk yang bekerja
PKBL : Program kemitraan bina lingkungan
PNPM Mandiri : Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
PKH : Program keluarga harapan
PNPM : Program nasional pemberdayaan masyarakat
PPK : Program pembangunan kecamatan
P2KP : Program pengentasan kemiskinan perkotaan
P3DT : Program percepatan pembangunan desa tertinggal
PPEMP : Program pemberd ekonomi masyarakat pesisir
P4NK : Proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil
PPIP : Program pembangunan infrastruktur perdesaan
P2DKT : Program percepatan daerah tertinggal dan kusus
PISEW : Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah
PMD : Pemberdayaan masyarakat dan desa
PEMDA : Pemerintah daerah
P2WKSS : Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju sehat sejahtera
P2W : Pembinaan peranan wanita
PMKS : penyandang masalah kesejahteraan sosial
PD BPR : Perusahaan daerah Bank perkreditan Rakyat
PUSKESMAS : Pusat kesehatan masyarakat
PPL : Petugas penyuluh lapangan
PEKKA : Perempuan kepala keluarga

R

RPJMN : Rencana pembangunan jangka menengah nasional
RPJMD : Rencana pembangunan jangka menengah daeraha
RKP : Rencana kerja pemerintah
RENJA : Rencana kerja

RENSTRA : Rencana setrategis
RPJPN : Rencana pembangunan jangka panjang nasional
RT : Rukun tetangga
RW : Rukun warga

S

SDKI : Survey data kematian ibu
SPP : Simpan pinjam perempuan
SNPK : Strategi nasional penanggulangan kemiskinan
SKPA : Satuan kerja perangkat aceh
SKPK : Satuan kerja perangkat kabupaten
SKPD : Satuan kerja perangkat daerah

T

TPAK : Tingkat partisipasi angkatan kerja
TP T : Tingkat pengangguran terbuka
TKPKD : Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
TKPK : Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

U

UMKM : Usaha mikro, kecil dan menengah
UPDB : Unit pelayanan dana bergulir
UB : Usaha bersama
UEP : Usaha ekonomi produktif
UPK : Unit pengelola kegiatan
UKS : Usaha kesejahteraan sosial
UPTD : Unit pelaksana teknis dinas

W

WDC : Women's development centre